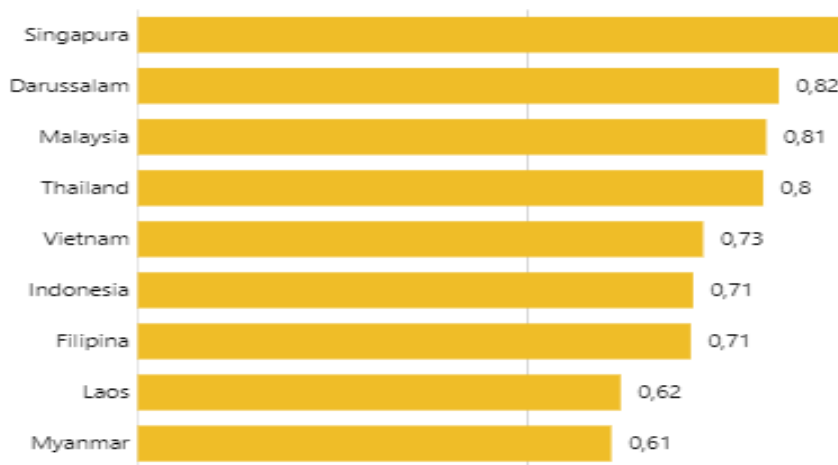


BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pendidikan adalah kunci peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk mendukung pembangunan berkelanjutan (SDGs). Namun, Indonesia sebagai negara berkembang masih memiliki tingkat pendidikan rendah dibandingkan negara-negara ASEAN, yang berdampak pada kualitas sumber daya manusianya. Pendidikan di Indonesia perannya belum optimal, hal ini karena pendidikan menjadi salah satu dimensi dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI) yang digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan dalam sebuah negara dalam menyediakan kesejahteraan warganya. IPM mencakup beberapa dimensi utama seperti harapan hidup, pendidikan dan standar hidup. Berikut merupakan data mengenai Indeks Pembangunan Manusia di ASEAN pada tahun 2022.



Gambar 1. 1 Indeks Pembangunan Manusia di ASEAN
Sumber : United Nations Development Programme (2022)

Data grafik di atas menjelaskan bahwa Indonesia pada tahun 2022, mencapai skor IPM sebesar 0,713. Indonesia juga menempatkan dalam kategori negara dengan Indeks Pembangunan Manusia yang tinggi, meskipun masih mendapatkan skor di bawah rata-rata global yang berada di angka 0,739, hal ini menempatkan Indonesia berada di peringkat ke 6 dari 11 negara ASEAN lainnya.

Pendidikan merupakan salah satu upaya untuk menciptakan kemajuan suatu negara, terlihat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dengan meningkatkan mutu pendidikan merupakan salah satu cara yang sangat penting untuk pembangunan yang berkelanjutan di berbagai aspek kehidupan manusia. Sistem pendidikan nasional juga harus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan baik dari tingkat lokal, nasional, maupun Global atau internasional (Mulyasa, 2006). UU No 23 Tahun 2003 mengenai pendidikan nasional mengaplikasikan bahwa proses pembelajaran pada siswa adalah bentuk dari pengembangan potensi dalam pengembangan ilmu menjadi seimbang baik itu ilmu agama, sosial maupun pengetahuan. Beberapa faktor sebagai penghambat peningkatan pendidikan, khususnya kemiskinan sehingga hal tersebut menjadi hambatan masyarakat dalam mengakses pendidikan. Menurut Herlina (2017) pendidikan dan kemiskinan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan dan saling berkaitan satu sama lain, karena kemiskinan dapat membatasi masyarakat dalam memperoleh pendidikan yang layak, dan dengan adanya kualitas pendidikan yang layak maka dapat memberantas kemiskinan, kemiskinan menjadi faktor penghambat pemerataan di Indonesia.

Gambar 1. 2 Tingkat Kemiskinan di Indonesia pada 2021-2023



Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia (diolah)

Berdasarkan data BPS pada tingkat kemiskinan di Indonesia pada 2021 sebesar 9,71% dari total penduduk Indonesia. Selama kurun waktu 2019-2023, kemiskinan di Indonesia dari beberapa tahun terakhir terlihat pada 2022 mencatatkan 9,57% atau mengalami penurunan sebesar 0,14% dari tahun 2021 dan tahun 2023 persentase kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan menjadi 9,36% hal ini yang menjadi salah satu cara dalam memberantas kemiskinan di dalam negeri, pemerintah juga mengharapkan penurunan kemiskinan berada pada 6,5 persen sampai 7,5 persen dalam RPJMD Tahun 2020-2024. Berikut merupakan tabel dari persentase kemiskinan dari Provinsi yang berada di Pulau Jawa.

Tabel 1. 1 Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Pulau Jawa 2019-2023

No	Provinsi	Tahun					Total
		2019	2020	2021	2022	2023	
1	Yogyakarta	11,7%	12,2%	12,8%	11,3%	11%	59,1%
2	Jawa Tengah	10,8%	11,4%	11,7%	10,9%	10,7%	55,7%
3	Jawa Timur	10,4%	11%	11,4%	10,3%	10,3%	53,5%
4	Jawa Barat	6,9%	7,8%	8,4%	8%	7,6%	38,8%
5	Banten	5,1%	5,9%	6,6%	6,1%	6,1%	30%
6	DKI Jakarta	3,5%	4,5%	4,7%	4,6%	4,4%	21,8%

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah (diolah)

Provinsi Jawa Tengah setiap tahunnya mengalami kenaikan secara perlahan terlihat pada tahun 2019 10,8% angka kemiskinan yang naik sebesar 0,61% pada 2020, sehingga pada tahun 2020 jumlah persentase angka kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah mencapai 11,41%, pada tahun 2022 persentase kemiskinan di Jawa Tengah mengalami penurunan sebesar 0,86%, hal ini menyebabkan secara perlahan juga angka persentase kemiskinan di Jawa Tengah pada tahun 2023 mengalami penurunan dan menjadi 10,77%, akan tetapi hal tersebut tidak menutup kemungkinan untuk Provinsi Jawa Tengah menempati posisi kedua setelah Provinsi Yogyakarta yang memiliki persentase kemiskinan yang tinggi, dikarenakan jumlah penduduk Jawa Tengah yang selalu mengalami kenaikan tiap tahunnya. Kemiskinan di Jawa Tengah juga dipengaruhi berbagai aspek, terlihat pada tabel berikut ini

Tabel 1. 2 Aspek yang Mempengaruhi Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah 2019-2023

No	ASPEK	TAHUN				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Pendidikan	27,7%	27,4%	27,1%	27,2%	27,3%
2	Kesehatan	13,9%	13,7%	13,4%	13,6%	13,5%
3	Ketidakmampuan Bekerja	12,8%	12,6%	12,5%	12,7%	12,6%
4	Perumahan	12,2%	12,0%	11,8%	12,7%	12,6%
5	Lingkungan	11,3%	11,1%	11,0%	11,7%	11,6%

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah (diolah peneliti, 2024)

Pendidikan menjadi aspek yang paling tinggi dan paling berpengaruh terhadap kemiskinan terlihat pada persentase tiap tahunnya angka pendidikan menurun secara perlahan pada tahun 2020 persentase kemiskinan akibat dari pendidikan sebesar

27,44% terlihat penurunan sebesar 0,34% dari persentase kemiskinan pada aspek pendidikan pada tahun 2019, tahun 2021 persentase kemiskinan kembali menurun sebesar 0,34% dari 27,44% pada tahun 2020, akan tetapi pada tahun 2022-2023 persentase kemiskinan akibat dari aspek pendidikan perlahan bertambah terlihat bahwa pada 2022 sebesar 27,22% dan pada tahun 2023 sebesar 27,34%.

Pemerintah dalam menjamin peningkatan kualitas pendidikan, pemerataan kesempatan kerja dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, dimana dalam pembangunan pendidikan wajib mengikuti dasar terhadap indeks pembangunan manusia, karena fokus dari pembangunan manusia dapat melahirkan sumber daya manusia yang memiliki daya saing yang berkompeten dan berkualitas dimana terdapat tiga hal yang menjadi pertimbangan dalam Indeks pembangunan manusia (IPM) seperti standar kehidupan yang layak, tingkat pendidikan dan usia harapan hidup. Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) terdapat beberapa indikator yang saat ini sudah tidak akurat lagi dalam mengukur IPM, sehingga untuk mengukur kualitas pendidikan dapat menggunakan indikator rata-rata lama sekolah dan angka harapan sekolah. Berikut adalah data tentang Angka Putus sekolah (APS) di Kota Semarang.

Tabel 1. 3 Angka Putus Sekolah (APS) di Kota Semarang 2019-2023

Uraian	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Siswa Putus Sekolah SD/MI	4.949	4.445	4,0004	3,553	3,112
Jumlah Siswa SD/MI	172,456	168,345	164,234	160,123	156,012
Jumlah Siswa Putus Sekolah SMP/MTS	4,241	3,914	3,589	3,314	3,044
Jumlah Siswa SMP/MTS	97,123	94,876	92,627	90,378	88,129

Jumlah Siswa Putus Sekolah SMA/SMK/MA	4,839	4,604	4,412	4,202	4,012
Jumlah Siswa SMA/SMK/MA	98,728	99,196	99,666	100.136	100,606

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Semarang (diolah peneliti, 2024)

Tabel di atas terlihat bahwa Jumlah siswa putus sekolah pada jenjang SMA/SMK/MA termasuk kategori terbanyak kedua setelah jumlah siswa putus sekolah pada tingkat SD akan tetapi, dalam kajian Program Indonesia Pintar (Kemendikbudristek, 2018) menjelaskan bahwa, Angka harapan putus sekolah yang tinggi akan menyebabkan angka pengangguran yang tinggi, terlihat jika siswa tidak menyelesaikan pendidikan pada semestinya maka siswa tersebut memiliki pengetahuan dan keterampilan yang sangat terbatas sehingga sulit untuk memasuki dunia pekerjaan. Angka putus sekolah yang tinggi juga mengakibatkan seseorang menjadi kehilangan kesempatan untuk mengikuti berbagai pelatihan dan pendidikan vokasi untuk meningkatkan kemampuan *hardskill* maupun *softskill* yang dimiliki oleh pelajar tersebut.

**Tabel 1. 4 Indikator yang Mempengaruhi Kualitas Pendidikan
di Kota Semarang 2019-2023**

No	INDIKATOR	TAHUN				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Angka Putus Sekolah	5,7%	5,3%	4,9%	4,6%	4,2%
2	Partisipasi Sekolah Wajib Belajar (PSWB)	97,2%	97,4%	97,5%	97,7%	97,8%

No	INDIKATOR	TAHUN				
		2019	2020	2021	2022	2023
3	Partisipasi Sekolah Usia 16- 18 Tahun	79,2%	80,1%	81,0%	82,0%	82,9%
4	Proposi Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Tamat SD/MI	92,4%	92,8%	93,2%	93,7%	94,1%
5	Proposi Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Tamat SMP/MTS	73,1%	74,4%	75,6%	76,9%	78,1%
6	Proposi Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Tamat SMA/SMK/MA	49,2%	50,8%	52,4%	54,1%	55,7%

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Semarang (diolah peneliti, 2024)

Pada tabel diatas terlihat bahwa proporsi penduduk usia 15 tahun terhadap pelajar yang sudah tamat SMA/SMK/MA memiliki angka persentase yang naik pada tiap tahunnya, terlihat pada tahun 2019 persentase penduduk yang tamat SMA sebesar 49,21 persen, sedangkan pada tahun 2020 mencapai 50,84 persen, hal ini mengalami peningkatan secara bertahap walaupun masih sangat jauh untuk mencapai angka 100 persen, Todaro (2000) menjelaskan bahwa semakin tinggi jenjang tinggi lama sekolah maka semakin tinggi jenjang Pendidikan yang dijalani, karena hal tersebut dapat mempengaruhi prospek kerja kedepannya. sehingga upaya pemerintah untuk mengurangi Angka putus sekolah yang tinggi dan meningkatkan persentase jumlah pelajar yang sudah tamat SMA perlu dilakukan secara serius dan berkelanjutan. Kota Semarang selain sebagai Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah juga sebagai tempat pertumbuhan ekonomi dimana tingkat kesenjangan ekonomi dan banyaknya keluarga

miskin yang ingin mendapatkan biaya bantuan khususnya pendidikan, terlihat dari table data Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kota Semarang tahun 2021 sampai 2023:

Tabel 1. 5 Data Sekolah Menengah Atas (SMA)
Kota Semarang Tahun 2021-2023

No	Wilayah	Data SMA		
		2021	2022	2023
1	Kec. Pedurungan	6	5	5
2	Kec. Tembalang	1	1	1
3	Kec. Banyumanik	9	9	9
4	Kec. Semarang Barat	13	13	14
5	Kec. Gunung Pati	4	5	4
6	Kec. Ngaliyan	2	3	2
7	Kec. Genuk	3	3	3
8	Kec. Mijen	5	5	5
9	Kec. Semarang Tengah	8	8	8
10	Kec. Semarang Utara	2	2	2
11	Kec. Semarang Timur	4	4	4
12	Kec. Semarang Selatan	5	5	5
13	Kec. Candisari	3	3	2
14	Kec. Gajah Mungkur	5	5	4
15	Kec. Gayamsari	3	3	3
16	Kec. Tugu	1	1	1
TOTAL		74	75	72

Sumber : Dapodikdasmen (data yang diolah) <https://dapo.kemdikbud.go.id/>

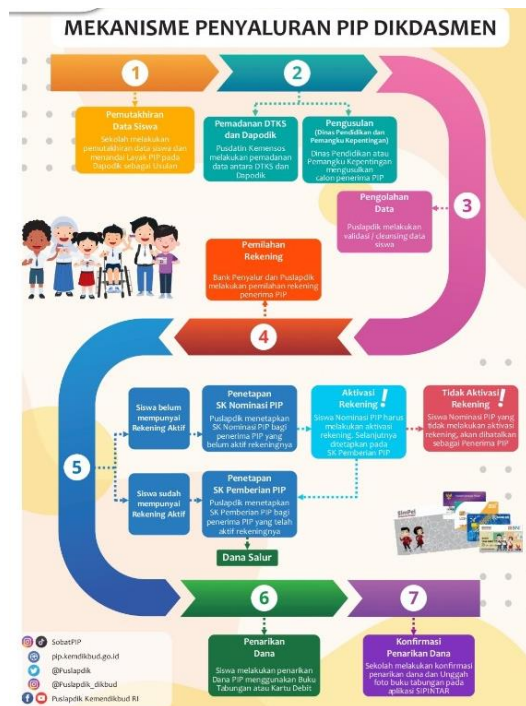
Berdasarkan data Sekolah Menengah atas di atas di 16 Kecamatan di Kota Semarang. Kecamatan Banyumanik, terdapat 9 Sekolah dengan 2 diantaranya merupakan sekolah negeri dan 7 sekolah swasta. Banyaknya sekolah pada Kecamatan Banyumanik menunjukkan akses pendidikan yang relatif cukup baik, namun dominasi sekolah swasta mengindikasikan perlunya perhatian yang khusus dalam implementasi Program Indonesia Pintar, karena sekolah negeri mempunyai biaya yang

lebih terjangkau dan gratis dibandingkan sekolah swasta yang memiliki biaya SPP maupun yang lainnya. Hal ini selaras bagaimana memastikan bahwa bantuan dari Indonesia Pintar dapat menjangkau seluruh siswa, baik sekolah negeri maupun swasta, serta melakukan proses pengawasan untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di wilayah tersebut.

Program Indonesia Pintar yang merupakan program berupa pemberian bantuan secara langsung berupa uang mengenai akses pendidikan dan kesempatan dalam belajar. Program yang dirancang untuk memastikan bahwa setiap anak yang berusia sekolah dari berbagai kalangan khususnya yang kurang mampu dapat menerima pendidikan hingga menengah atas baik secara jalur formal maupun informal. Sesuai dengan instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 yang menjelaskan mengenai Program Indonesia Pintar (PIP) kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk menyiapkan Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan segera menyalurkan dana Program Indonesia Pintar (PIP) kepada para orang tua siswa yang memiliki keterbatasan dalam membiayai pendidikan. Kartu Indonesia Pintar merupakan kartu yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang didasarkan pada Basis Data Terpadu yang dikeluarkan oleh tim penanggulangan kemiskinan di Indonesia yang kemudian akan diberikan kepada anak dari keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) sebagai bukti bahwa siswa tersebut menerima dan terdaftar dari Program Indonesia Pintar (PIP). Adanya Program Indonesia Pintar ini guna melanjutkan program yang sudah ada sebelumnya yaitu Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang berlangsung pada Juli tahun 2005 dan

Bantuan Siswa Miskin (BSM) yang berjalan pada tahun 2008. Kemendikbudristek juga mengeluarkan mekanisme penyaluran dana Program Indonesia Pintar

Gambar 1. 3 Mekanisme Penyaluran Program Indonesia Pintar (PIP)



Sumber: SiPintar pip.kemdikbud.go.id (2024)

Mekanisme penyaluran dana PIP memiliki beberapa tahapan diantaranya yaitu :

1. Pemutakhiran data siswa, hal ini dilakukan oleh sekolah untuk melakukan validasi data dan menandai layak PIP pada Dapodik sebagai usulan
2. Pemadanan DTKS, P3KE, Dapodik, pengusulan, hal ini dilakukan oleh beberapa Lembaga seperti Pusdatin Kemensos dan Kemmendikbudristek kepada pemadanan DTKS P3KE, dan Dapodik, kemudian setelah itu Dinas Pendidikan atau pemangku kepentingan dapat mengusulkan calon penerima PIP

3. Pengolahan Data, dilakukan oleh Puslapdik dengan melakukan validasi data calon penerima
4. Pemilahan Rekening, Bank Penyalur yang melakukan pemilahan rekening penerima PIP
5. Siswa yang belum mempunyai rekening aktif dan siswa yang sudah mempunyai rekening aktif, hal ini dilakukan oleh puslapdik untuk menetapkan SK nominasi bagi calon penerima yang sudah maupun belum mempunyai rekening yang kemudian akan dilakukannya aktivasi rekening agar SK pemberian PIP dapat diturunkan.
6. Penyaluran dana PIP, Puslapdik menyalurkan dana PIP kepada Bank Penyalur (BSI, BRI, BNI), penarikan dana PIP dapat menggunakan Buku Tabungan atau Kartu Debit
7. Konfirmasi penarikan dana, sekolah melakukan konfirmasi penarikan dana dengan unggahan foto buku Tabungan pada aplikasi SiPintar.

Program Indonesia Pintar memiliki tujuan sesuai yang diatur oleh peraturan Kementerian Pendidikan dan kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar, yaitu :

1. Meningkatkan akses pendidikan bagi anak berusia 6 (enam) sampai 21 (dua puluh satu tahun) untuk mendapatkan layanan pendidikan yang layak sampai tamat satuan pendidikan menengah dan mendukung pelaksanaan pendidikan wajib belajar 12 (dua belas) tahun.

2. Mencegah peserta didik dari putus sekolah (*drop out*) atau tidak dapat melanjutkan sekolah akibat kondisi finansial khususnya ekonomi.
3. Menarik kembali peserta didik yang putus sekolah (*drop out*) sehingga mendapatkan kembali layanan pendidikan atau Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) ∨ Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)/ Lembaga Kursus Pelatihan (LKP), satuan pendidikan non-formal lainnya dari Balai Latihan Kerja (BLK)

Program Indonesia Pintar (PIP) memiliki tujuan utama yaitu mencegah peserta didik putus sekolah dengan memberikan bantuan finansial kepada keluarga yang kurang mampu, sehingga pemerintah diharapkan dapat mengatasi siswa yang telah putus sekolah untuk kembali melanjutkan pendidikan yang layak, selain itu program ini juga dirancang untuk meringankan beban biaya pendidikan kepada keluarga yang kurang mampu termasuk biaya langsung maupun tidak langsung. Berikut ini terdapat Jumlah Angka Putus Sekolah di Indonesia dengan Pengalokasian Dana PIP tahun 2020-2022

Tabel 1. 6 Data Jumlah Angka Putus Sekolah di Indonesia Dengan Pengalokasian Dana PIP tahun 2020-2022

No.	Tahun	SD	SMP	SMK	SMA	Alokasi DANA PIP	
						Jumlah Dana	Jumlah Siswa
1	2020	59.443	38.464	32.395	26.864	Rp 9.713.044.175.000,00	18.092
2	2021	44.516	11.378	13.951	13.879	Rp 9.628.233.300.000,00	18.084
3	2022	38.176	15.042	12.063	10.022	Rp 9.628.233.300.000,00	17.953
TOTAL		142.135	64.884	58.409	50.765	Rp 28.969.510.775.000,00	54.129
		316.193					

Sumber : Si Pintar pip.kemdikbud.go.id (diolah) <https://pip.kemdikbud.go.id>

Data tersebut menjelaskan bahwa jumlah angka putus sekolah mengalami penurunan setiap tahunnya terlihat jelas sejak tahun 2020-2022 , namun jumlah siswa yang menerima PIP juga mengalami penurunan pada tahun 2020-2021, hal ini membuat kebijakan pemerintah dalam mengatasi angka putus sekolah belum berjalan secara maksimal karena masih tingginya angka putus sekolah, menurut Indonesia Corruption Watch (2018) Sebagian dana KIP/PIP sudah digunakan untuk membiayai pendidikan murid (biaya personal dan pungutan/sumbangan ke sekolah). Namun, sebagian besar lagi dana tersebut belum digunakan untuk keperluan pendidikan, hal ini membuat pemerintah terus membuat melakukan evaluasi kebijakan dalam Program Indonesia Pintar setiap tahunnya.

Pasal 4 Kemendikbud Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar menjelaskan bahwa program ini diperuntungkan bagi anak berusia 6 sampai 21 tahun untuk mendapatkan pelayanan pendidikan hingga tamat satuan pendidikan dasar hingga menengah, berikut terdapat beberapa syarat yang menjadi prioritas penerima Program Indonesia Pintar, diantaranya :

- 1) Peserta didik yang mempunyai Kartu Indonesia Pintar
- 2) Peserta didik yang berasal dari keluarga yang miskin/rentan miskin atau memiliki pertimbangan khusus seperti:
 - a. Peserta didik berasal dari keluarga peserta Program Keluarga Harapan (PKH)
 - b. Peserta didik berasal dari keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera

- c. Peserta didik berstatus yatim/piatu/piatu dari sekolah/panti sosial/panti asuhan
- d. Peserta didik yang terkena dampak bencana alam
- e. Peserta didik yang tidak bersekolah (*drop out*) yang diharapkan kembali ke sekolah
- f. Peserta didik yang mengalami kelainan fisik, korban musibah, dari orang tua yang mengalami pemutusan hubungan kerja, di daerah konflik, dari keluarga terpidana, berada di Lembaga Pemasyarakatan, memiliki lebih dari 3 (tiga) saudara yang tinggal dalam satu rumah
- g. Peserta pada lembaga khusus atau satuan pendidikan nonformal lainnya.

Syarat untuk mendapatkan dan menjadi penerima Program Indonesia Pintar sudah terpenuhi, terdapat beberapa langkah maupun prosedur yang dilakukan untuk mendaftarkan diri sebagai penerima Program Indonesia Pintar, diantaranya :

- 1) Menyiapkan berkas yang diperlukan
 - a. Kartu Keluarga (KK)
 - b. Akta Kelahiran
 - c. Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) atau SKTM apabila tidak mempunyai KKS
 - d. Rapor hasil belajar siswa
 - e. Surat pemberitahuan penerima BSM dari Kepala Sekolah/Madrasah
- 2) Melakukan proses pendaftaran dengan membawa KKS orang tua ke lembaga pendidikan terdekat, apabila tidak memiliki KKS, maka orang tua dapat

meminta Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari RT/RW dan Kelurahan/Desa terlebih dahulu

- 3) Pengajuan Calon Penerima, akan dicatat data siswa calon penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) untuk dikirim atau diusulkan ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
- 4) Pendaftaran dapodik dan Seleksi Dinas Pendidikan untuk mengirimkan hasil rekapitulasi data pengajuan KIP ke Kemdikbud.
- 5) Sekolah yang mendaftarkan calon peserta KIP ke aplikasi Data pokok Pendidikan (Dapodik). Sekolah tersebut harus berada dalam naungan Kemendikbud dan wajib memasukan data calon penerima KIP
- 6) Kemendikbud akan mengirimkan KIP kepada calon penerima lolos seleksi

Program PIP ini diharapkan dapat meningkatkan akses kepada keluarga yang kurang mampu dalam bidang pendidikan guna mensukseskan pendidikan secara gratis, baik bagi peserta didik yang sudah terdaftar maupun belum terdaftar di sekolah, Pengajuan PIP di Kota Semarang terlihat banyak orang tua peserta didik yang rencana mengusulkan sebagai calon penerima PIP dan realisasi dana PIP yang bertambah setiap tahunnya hal ini karena dapat membantu membiayai sekolah peserta didik dan membantu pemerintah dalam memutuskan angka putus sekolah secara drastis, berikut merupakan tabel pendistribusian PIP yang ada di Kota Semarang dari tahun 2021 sampai 2023:

Tabel 1. 7 Data Penyaluran Program Indonesia Pintar (PIP)**SMA Kota Semarang Tahun 2021-2023**

Kecamatan	2021		2022		2023		Penerima PIP
	Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi	
Kec. Semarang Utara	599	170	559	398	602	300	49%
Kec. Semarang Tengah	1035	262	509	615	944	431	45%
Kec. Ngaliyan	598	138	555	378	597	283	44%
Kec. Genuk	457	125	414	286	443	192	43%
Kec. Tembalang	294	53	247	164	251	110	43%
Kec. Gayamsari	204	59	191	154	167	70	41%
Kec. Semarang Barat	860	210	622	454	723	287	39%
Kec. Pedurungan	490	123	411	334	536	205	38%
Kec. Banyumanik	743	297	540	308	850	316	37%
Kec. Mijen	512	167	483	333	621	235	37%
Kec. Gajah Mungkur	504	220	394	235	456	165	36%
Kec. Semarang Selatan	1009	215	932	509	1234	419	33%
Kec. Semarang Timur	337	97	290	152	280	95	33%
Kec. Candisari	305	127	109	75	226	46	20%
Kec. Gunung Pati	470	89	383	247	1201	193	16%
Kec. Tugu	6	1	8	1	35	0	2%

Sumber : Si Pintar (pip.kemdikbud.go.id) <https://pip.kemdikbud.go.id>

Data penyaluran PIP di 16 kecamatan di Kota Semarang. Berdasarkan data tersebut dijelaskan bahwa penyaluran dana Program Indonesia Pintar diklasifikasikan menjadi tiga kategori yaitu realisasi tinggi, realisasi sedang dan realisasi rendah. Terlihat dari jumlah dana yang disalurkan ke kecamatan yang ada di Kota Semarang, salah satunya Kecamatan Banyumanik terlihat pada data tersebut Kecamatan Banyumanik termasuk ke kategori realisasi yang sedang karena dana yang dicairkan dibandingkan dana yang disalurkan cukup jauh untuk perbandingannya dan terdapat fluktuatif data, antara jumlah dana yang disalurkan dan dicairkan di Kecamatan Banyumanik dari tahun ketahun, Kecamatan Banyumanik menurut data

Dapodikdasmen mempunyai jumlah SMA yang banyak dibandingkan dengan Kecamatan lain, sehingga adanya gap yang cukup jauh antara rencana dan realisasi penerima PIP dapat mengindikasikan adanya dinamika dalam penyerapan anggaran dan pelaksanaan Program Indonesia Pintar. Peningkatan ini juga mengindikasikan adanya tantangan dalam implementasi sebelumnya dan potensi ketergantungan pada bantuan, yang mencerminkan masalah ekonomi yang lebih luas. Kemudian selain data penyaluran Program Indonesia Pintar berikut adalah data penyaluran anggaran dari Program Indonesia Pintar tahun 2019-2020, yaitu sebagai berikut:

Gambar 1. 4 Dana Penyaluran Program Indonesia Pintar (PIP)
Kota Semarang Tahun 2021-2023

Kecamatan	2021		2022		2023		Persentase Penerima PIP
	Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi	
Kec. Semarang Utara	Rp 525,000.000	Rp 152,500.000	Rp 479,000.000	Rp 341,000.000	Rp 514,500.000	Rp 241,000.000	49%
Kec. Semarang Tengah	Rp 880,500.000	Rp 232,500.000	Rp 760,500.000	Rp 546,500.000	Rp 827,000.000	Rp 252,500.000	45%
Kec. Ngalivan	Rp 486,500.000	Rp 118,500.000	Rp 486,500.000	Rp 344,000.000	Rp 545,500.000	Rp 252,000.000	44%
Kec. Genuk	Rp 378,500.000	Rp 106,500.000	Rp 360,500.000	Rp 251,000.000	Rp 400,000.000	Rp 165,500.000	43%
Kec. Tembalang	Rp 246,500.000	Rp 44,500.000	Rp 225,500.000	Rp 149,000.000	Rp 227,500.000	Rp 92,000.000	43%
Kec. Gayamsari	Rp 170,500.000	Rp 51,500.000	Rp 169,500.000	Rp 133,000.000	Rp 151,000.000	Rp 58,500.000	41%
Kec. Semarang Barat	Rp 737,000.000	Rp 181,500.000	Rp 550,500.000	Rp 400,500.000	Rp 664,500.000	Rp 246,000.000	39%
Kec. Pedurungan	Rp 410,000.000	Rp 1,113,000.000	Rp 365,500.000	Rp 296,000.000	Rp 497,000.000	Rp 180,000.000	38%
Kec. Banyumanik	Rp 616,500.000	Rp 235,500.000	Rp 482,000.000	Rp 279,000.000	Rp 736,500.000	Rp 267,500.000	37%
Kec. Mijen	Rp 431,500.000	Rp 146,500.000	Rp 414,000.000	Rp 284,000.000	Rp 551,000.000	Rp 198,000.000	37%
Kec. Gajah Mungkur	Rp 483,500.000	Rp 215,000.000	Rp 364,500.000	Rp 208,500.000	Rp 432,500.000	Rp 157,000.000	36%
Kec. Semarang Selatan	Rp 887,500.000	Rp 190,000.000	Rp 833,000.000	Rp 448,000.000	Rp 1,167,000.000	Rp 376,000.000	33%
Kec. Semarang Timur	Rp 307,500.000	Rp 87,500.000	Rp 229,000.000	Rp 118,500.000	Rp 257,500.000	Rp 86,000.000	33%
Kec. Candisari	Rp 296,500.000	Rp 122,500.000	Rp 90,500.000	Rp 59,500.000	Rp 214,000.000	Rp 39,500.000	20%
Kec. Gunung Pati	Rp 394,500.000	Rp 75,000.000	Rp 349,000.000	Rp 223,000.000	Rp 989,000.000	Rp 167,000.000	16%
Kec. Tugu	Rp 6,000.000	Rp 1,000.000	Rp 4,500.000	Rp 1,000.000	Rp 31,500.000	Rp 1,000.000	2%

Sumber : SiPintar pip.kemdikbud.go.id (diolah) <https://pip.kemdikbud.go.id>

Data penyaluran dana PIP di 16 kecamatan di Kota Semarang diklasifikasikan menjadi tiga kategori yaitu realisasi tinggi, realisasi sedang dan realisasi rendah. Berdasarkan klasifikasi data tersebut Kecamatan Banyumanik termasuk kedalam kategori sedang terlihat dari jumlah anggaran yang diberikan, akan tetapi terdapat

kesenjangan yang signifikan antara anggaran yang disalurkan dengan anggaran yang dicairkan, yaitu pada tahun 2021 anggaran yang disalurkan sebesar Rp. 616.500.000, namun dana yang berhasil dicairkan pada tahun 2021 sebesar Rp. 235.500.000, selain itu pada tahun 2023 anggaran yang disalurkan sebesar Rp. 736.500.000, lebih tinggi angka penyalurannya dibanding tahun sebelumnya, namun dana yang berhasil dicairkan sebesar Rp. 267.500.000. Perbedaan ini cukup besar antara dana yang disalurkan dengan dana yang dicairkan sehingga perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberjalanan kebijakan Program Indonesia Pintar sehingga sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Pada penelitian yang serupa pernah dilakukan oleh Riska Sri Handayani (Djoyosuroto, Prasetyono, & Mulyani, 2018) dengan judul ‘Implementasi Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) di SMA Negeri 2 Dumoga’. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerima bantuan PIP yang didukung dengan penggunaan Dapodik yang akurat dalam penerimaan PIP, ditemukan beberapa kendala yang dihadapi oleh pihak sekolah seperti kebingungan pelaksana akibat perubahan mekanisme yang sering terjadi, penggunaan dana oleh siswa untuk kebutuhan non-pendidikan, dan kesulitan sekolah dalam mendapatkan bukti penggunaan dana dari siswa. Dalam hal penyaluran Kartu Indonesia Pintar (KIP) kepada siswa di SMA Negeri 2 Dumoga pada tahun 2015, terdapat 26 siswa yang semuanya memiliki KIP. Siswa yang memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan KIP setidaknya telah memenuhi satu dari berbagai kriteria yang ada. Dalam aspek penarikan dana, siswa

dan guru yang bertanggung jawab harus langsung ke Bank Nasional Indonesia (BNI). Sekolah tidak akan membiarkan penerima KIP tanpa pengawasan dan tanggung jawab, sehingga hal ini menjadi faktor penting yang harus diperhatikan. Berdasarkan surat penyaluran bantuan, disebutkan bahwa dana tidak dapat dibagikan secara bersama atau kolektif, sehingga siswa penerima bantuan harus mengambilnya sendiri dengan pendampingan guru yang ditunjuk oleh sekolah.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Kusnaeni, R. A., & Rostyaningsih, D. (2022) yang lokus penelitiannya berada di Kabupaten Semarang, permasalahan dalam penelitian ini yaitu terlihat terdapat ketidaksesuaian antara capaian target dari Program Indonesia Pintar tidak sesuai dengan jumlah peserta didiknya, hal tersebut sering terulang di setiap tahun berikutnya.

Penelitian serupa selanjutnya membahas mengenai pada penerapan Program Indonesia Pintar khususnya di Kecamatan Gebog SMP 3 Satu Atap yang menunjukkan angka fluktuatif penerima PIP dari tahun 2015-2017. penelitian ini yang ditulis oleh Ilya Arina, R. (2018). Permasalahan dalam penelitian ini yaitu, selain itu menurut Dinas Pendidikan di Kabupaten Kudus menjelaskan bahwa tidak tersalurkannya bantuan PIP dikarenakan siswa dan orang tua kurang tangkas atau cekatan dalam proses pengambilan dana PIP bahkan lupa untuk mengambilnya dan bank yang ditunjuk oleh pemerintah terkadang mengalami keterlambatan karena pelayanan bagi penerima Program Indonesia Pintar (PIP) hanya tersedia 1 loket saja.

Banyaknya jumlah SMA di Kota Semarang dan kepadatan populasi masyarakatnya yang semakin bertambah tiap tahunnya membuat Kota Semarang berupaya mengatasi permasalahan dalam pelayanan pendidikan, salah satunya Kecamatan Banyumanik memiliki kondisi sosial maupun ekonomi yang beragam, Kecamatan Banyumanik merupakan kecamatan dengan penduduk posisi terpadat nomor 4 pada tahun 2022, menurut (BPS Kota Semarang). Dari Kecamatan Banyumanik dapat dilihat bahwa setiap sekolah memiliki jumlah peserta didik yang berbeda-beda penerima Program Indonesia Pintar, antara lain:

Tabel 1. 8 Peserta Didik SMA di Kecamatan Banyumanik Kota Semarang

No	Nama Sekolah	Tingkat	Status	Peserta Didik		
				2021	2022	2023
1	SMA NEGERI 04	SMA	Negeri	1,176	1,179	1,180
2	SMA NEGERI 09	SMA	Negeri	1,152	1,147	1,180
3	SMA ISLAM AL AZHAR 14	SMA	Swasta	323	396	451
4	SMA ISLAM HIDAYATULLAH	SMA	Swasta	356	376	381
5	SMA MARDISISWA	SMA	Swasta	274	269	240
6	SMA MULTAZAM IBS	SMA	Swasta	70	86	92
7	SMA NASIONAL	SMA	Swasta	4	0	0
8	SMA PERMATA BANGSA	SMA	Swasta	21	17	15
9	SMA BINA BANGSA SCHOOL	SPK SMA	Swasta	86	74	91
Total				3,462	3,544	3,630

Sumber : Dapodikdasmen (data yang diolah) <https://dapo.kemdikbud.go.id/>

Data Peserta didik di Kecamatan Banyumanik menunjukan bahwa SMA Negeri 4 Kota Semarang menduduki posisi pertama dengan jumlah siswa pada tahun 2021 sampai 2023 mengalami penambahan peserta didik secara perlahan, sedangkan SMA Negeri 9 Kota Semarang pada tahun 2022 mengalami penurunan peserta didik menjadi 1.447 siswa, pada tahun 2023 naik menjadi 1.180 siswa, dari data tersebut juga terlihat

bahwa sekolah negeri memiliki jumlah peserta didik yang lebih banyak dibandingkan sekolah swasta hal ini dikarenakan sekolah negeri pada umumnya memiliki biaya sekolah yang lebih murah atau gratis dibandingkan sekolah swasta hal ini menjadi pertimbangan bagi orang tua yang memiliki keterbatasan finansial. KIP di 16 kecamatan di Kota Semarang. Berdasarkan data tersebut dijelaskan bahwa pada tahun 2022. Dari data peserta didik di SMA yang ada pada Kecamatan Banyumanik dapat dilihat bahwa setiap sekolah memiliki jumlah peserta didik yang berbeda-beda, hal ini serupa dengan jumlah penerima Program Indonesia Pintar di SMA Kecamatan Banyumanik, antara lain:

**Tabel 1. 9 Jumlah Siswa Penerima Program Indonesia Pintar (PIP) SMA
di Kecamatan Banyumanik Kota Semarang**

No	Nama Sekolah	2021		2022		2023	
		Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi
1	SMA NEGERI 04	162	150	201	115	252	119
2	SMA NEGERI 09	227	224	254	153	322	141
3	SMA MARDISISWA	40	40	58	32	204	48
4	SMA MULTAZAM IBS	5	5	8	5	36	4
5	SMA ISLAM AL AZHAR 14	6	4	6	0	5	0
6	SMA ISLAM HIDAYATULLAH	6	2	1	1	9	2
7	PKBM NGUDI KAWRUH	-	-	9	0	18	1
8	PKBM ANUGRAH BANGSA	-	-	3	2	1	1
Jumlah		446	425	540	308	847	316

Sumber : Si Pintar (pip.kemdikbud.go.id) <https://pip.kemdikbud.go.id>

Data penerima PIP di 8 SMA Kecamatan Banyumanik di Kota Semarang. Berdasarkan data tersebut dijelaskan bahwa penyaluran dana Program Indonesia Pintar diklasifikasikan menjadi tiga kategori yaitu realisasi tinggi, realisasi sedang dan realisasi rendah. SMA 4 dan SMA 9 termasuk kedalam kategori realisasi yang tinggi karena penerimaan PIP dari tahun ke tahun cukup stabil. Sedangkan untuk posisi ketiga sampai posisi ke 6 dikategorikan realisasi sedang karena terdapat beberapa sekolah yang mengalami peningkatan penerima dan ada juga yang tidak menerima PIP sama sekali. Walaupun penerima Program Indonesia Pintar dari data tersebut pada tahun 2021-2023 di Kecamatan Banyumanik menunjukkan angka yang naik turun atau fluktuasi. Permasalahan tersebut sama halnya dengan Jumlah siswa penerima PIP di SMA Negeri 4, SMA Negeri 9 dan Mardisiswa Kota Semarang yang mengalami fluktuasi yang cukup signifikan, SMA Mardisiswa yang berada pada kategori realisasi sedang untuk realisasi penerapan PIP lebih baik dibandingkan SMA swasta yang berada di Kecamatan Banyumanik. Tentunya dalam penerapan Program Indonesia Pintar juga akan berdampak terhadap kondisi masyarakat yang tinggal berdekatan atau berdomisili di kelurahan salah satunya SMA Negeri 4 Kota Semarang dan Mardisiswa yang berada pada Kelurahan Spondol Wetan, berikut terdapat data Partisipasi Pendidikan di wilayah Kelurahan di Kecamatan Banyumanik, diantaranya:

**Tabel 1. 10 Jumlah Partisipasi Pendidikan SMA di
Kecamatan Banyumanik**

Kelurahan	Belum/Tidak Sekolah	Sudah Sekolah (SMA)	Belum/Tidak Sekolah	Sudah Sekolah (SMA)	Belum/Tidak Sekolah	Sudah Sekolah (SMA)
	2021		2022		2023	
PUDAKPAYUNG	5,63%	6,98%	5,86%	7%	5,91%	7,06%
GEDAWANG	2,59%	2,63%	2,76%	2,76%	2,81%	2,79%
JABUNGAN	1,22%	0,77%	1,26%	0,81%	1,31%	0,86%
PEDALAMNGAN	2,49%	3,03%	2,57%	2,94%	2,59%	2,95%
BANYUMANIK	2,62%	3,66%	2,79	3,71%	2,89%	3,72%
SRONDOL KULON	3,27%	3,99%	3,31%	3,99%	3,22%	3,92%
SRONDOL WETAN	4,46%	6,31%	4,60%	6,21%	4,58%	6,15%
NGESREP	3,07%	4,35%	3,01%	4,35%	2,95%	4,35%
TINJOMOYO	2,55%	2,94%	2,54%	2,98%	2,48%	2,98%
PADANGSARI	2,62%	3,59%	2,66%	3,50%	2,66%	3,46%
SUMURBOTO	2,09%	2,45%	2,11%	2,40%	2,08%	2,36%
Total	32,60%	40,71%	33,47%	40,64%	33,48%	40,60%

Sumber : Si Pintar (pip.kemdikbud.go.id) <https://pip.kemdikbud.go.id>

Data di atas menunjukkan bahwa masih terdapat angka peserta didik yang belum/tidak sekolah, hal ini terlihat pada tahun 2021-2023 mengalami kenaikan secara perlahan, terlihat juga masyarakat yang kurang memahami pentingnya pendidikan sehingga dapat mengurangi angka kemiskinan. Oleh karena itu peran kelurahan dalam memberikan arahan Program Indonesia Pintar juga penting karena kelurahan merupakan ujung tombak pada pemerintahan tingkat paling bawah dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat. Untuk tercapainya suatu keberhasilan dalam Program Indonesia Pintar, kelurahan memiliki peran penting diantaranya :

- 1) Identifikasi penerima, kelurahan dan kecamatan bertugas mendata warga miskin dan rentan menerima PIP, pendataan ini dilakukan berdasarkan data dan informasi seperti Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)
- 2) Verifikasi dan validasi data. Peran kelurahan memastikan bahwa data yang digunakan akurat dan tepat
- 3) Usulan Penerima, kelurahan mengusulkan penerima PIP kepada pemerintah pusat melalui dinas pendidikan atau Sekolah yang terkait
- 4) Koordinasi, kelurahan dan kecamatan berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait penyaluran dana PIP
- 5) Pembinaan dan pengawasan, kelurahan melakukan pembinaan berupa sosialisasi mengenai PIP dan melakukan pengawasan untuk memastikan bahwa bantuan PIP digunakan dengan tepat sasaran.

Sesuai dengan tujuan yang tercantum dalam Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar, PIP bertujuan untuk mencegah siswa putus sekolah. Oleh karena itu, penulis ingin melakukan penelitian lebih lanjut mengenai pelaksanaan Program Indonesia Pintar di SMA Kecamatan Banyumanik Kota Semarang melibatkan peran penting dari kelurahan. Melalui program ini, kelurahan bertanggung jawab atas penyaluran Kartu Indonesia Pintar (KIP) kepada keluarga penerima manfaat, dengan melakukan identifikasi, verifikasi, dan distribusi kartu secara efisien. Selain itu, kelurahan juga memberikan pendampingan dan pemantauan kepada keluarga penerima manfaat untuk

memastikan bahwa manfaat KIP digunakan dengan tepat, serta memberikan dukungan dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam pendidikan. Kerjasama dengan sekolah-sekolah di wilayahnya juga menjadi fokus, dimana kelurahan berupaya untuk memastikan akses pendidikan yang layak bagi siswa-siswa penerima KIP melalui penyediaan bantuan perlengkapan sekolah atau biaya pendidikan tambahan. Selain itu, kelurahan juga aktif dalam pendataan dan monitoring angka putus sekolah, yang menjadi dasar evaluasi dan perencanaan kebijakan lebih lanjut. Melalui edukasi dan pelatihan kepada masyarakat, kelurahan berupaya meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendidikan serta manfaat dari Program Indonesia Pintar dalam meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan di wilayah Kecamatan Banyumanik khususnya pada jenjang sekolah menengah atas di Kecamatan Banyumanik Kota Semarang. Berdasarkan uraian tersebut, maka masalah yang muncul adalah mengapa implementasi Program Indonesia Pintar di Kota Semarang masih belum berjalan dengan efektif

Implementasi PIP di Kecamatan Banyumanik juga mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penyaluran bantuan PIP, dan mencari solusi strategis untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan PIP. Sehingga peneliti mengambil judul “Implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) di SMA Kecamatan Banyumanik Kota Semarang”

1.2. Identifikasi Masalah

1. Perbedaan persepsi mengenai manfaat Program Indonesia Pintar di setiap kelurahan yang ada di Kecamatan Banyumanik yang berdampak terhadap peningkatan angka putus sekolah
2. Penerbitan Kartu Indonesia Pintar KIP yang diterapkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi belum terealisasi secara maksimal di Kecamatan Banyumanik
3. Terdapat fluktuasi penerima bantuan dikarenakan ketidaksesuaian target penerimaan PIP di SMA Kecamatan Banyumanik
4. Terdapat kendala dalam proses pencairan bantuan Program Indonesia Pintar yang dapat menghambat implementasi Program Indonesia Pintar
5. Terbatasnya pemahaman masyarakat mengenai Program Indonesia Pintar sebagai salah satu upaya pemerintah dalam mengatasi kemiskinan

1.3. Rumusan Masalah

Perumusan masalah harus mengandung unsur yang jelas dan tepat karena nantinya akan menentukan suatu bab pokok yang akan dibahas dalam sebuah penelitian. Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka adapun beberapa rumusan masalah yang diambil, diantaranya :

1. Bagaimana implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) di SMA Kecamatan Banyumanik Kota Semarang?
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) di SMA Kecamatan Banyumanik Kota Semarang?

1.4. Tujuan Penelitian

1. Mengidentifikasi Implementasi Program Indonesia Pintar di SMA Kecamatan Banyumanik Kota Semarang
2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Program Indonesia Pintar di SMA Kecamatan Banyumanik Kota Semarang

1.5. Kegunaan Penelitian

Berdasar pada judul penelitian tersebut, peneliti mengharapkan agar penelitian ini kedepannya dapat memberikan banyak manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis, berikut merupakan manfaat yang peneliti harapkan yaitu:

1) Aspek Teoritis

Selain sebagai basis untuk penelitian masa depan tentang implementasi Program Indonesia Pintar di Kecamatan Banyumanik Kota Semarang, ini diharapkan akan memperkaya bidang ilmu administrasi publik dengan menyediakan panduan untuk menganalisis dan menerapkan kebijakan publik.

2) Aspek Praktis

a. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian dapat membantu pemerintah dalam mengevaluasi efektivitas dan efisiensi pelaksanaan Program Indonesia Pintar.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian dapat Memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat tentang manfaat dan dampak Program Indonesia Pintar bagi anak-anak mereka.

c. Bagi Peneliti

Hasil penelitian yang dilakukan dapat memperluas pemahaman dan memberikan pengalaman unik bagi mahasiswa yang mempelajari administrasi publik sekaligus mengatasi permasalahan Program Indonesia Pintar.

1.6. Kerangka Pemikiran Teoritis

1.6.1. Penelitian Terdahulu

NO.	Peneliti / Tahun/ Judul	Fokus Kajian	Metode dan Teori	Hasil Penelitian
1.	Kusnaeni, R. A. (2022). Implementasi Program Indonesia Pintar di SDN Grogik 01 Kec. Ungaran Barat	Mengidentifikasi faktor penentu dan keberhasilan dari Implementasi Program Indonesia Pintar di SDN Grogik 01 Kec. Ungaran Barat	Deskriptif Kualitatif Teori: Administrasi Publik Kebijakan Publik Implementasi Kebijakan Program	Implementasi kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) pada tahun 2019 dari siswa berjumlah 34 anak disebut pantas menerima sebab atas pertimbangan mata pencaharian orang tua dan tempat tinggal yang belum layak, bahkan tempat tinggal murid tergolong jauh dari sekolah sehingga penyerahan KIP ini tergolong tepat sasaran. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan penelitian ini adalah: jenis manfaat, derajat perubahan yang diinginkan, letak, pengambilan keputusan, dan tingkat kepatuhan dari pelaksana kebijakan.
2.	Riska, I. A., & Rostyaningsih, D. (2018). Implementasi Program Indonesia Pintar di SMP 3 Satu Atap Gebog Kudus	Biaya pendidikan yang tinggi, sehingga untuk mewujudkan wajib belajar 12 tahun pemerintah membuat Program Indonesia Pintar, salah satunya terdapat di SMP Negeri 3 Satu Atap Gebog Kudus	Deskriptif Kualitatif Teori: Administrasi Publik Kebijakan Publik Implementasi Kebijakan	Implementasi Program Indonesia Pintar di SMP 3 Satu Atap Gebog Kudus ini masih belum berjalan dengan baik. Terdapat beberapa permasalahan seperti Ketidakhahaman orang tua penerima Program Indonesia Pintar terhadap program dan minat siswa untuk melanjutkan sekolah yang rendah. Hanya sebatas pemberian bantuan biaya. Selain itu sosialisasi masih kurang berjalan dengan baik dikarenakan sosialisasi hanya dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kepemudaan

NO.	Peneliti / Tahun/ Judul	Fokus Kajian	Metode dan Teori	Hasil Penelitian
				dan Olahraga melalui web resmi Program Indonesia Pintar, surat pemberitahuan dan media sosial
3.	Herawati, N. R. (2022). Implementasi Program Indonesia Pintar di SMP Kota Semarang	Dinas Pendidikan Kota Semarang lebih meningkatkan sosialisasi kepada sekolah atau akan lebih baik sosialisasi kepada masyarakat, serta meningkatkan intensitas pertemuan atau koordinasi pelaksanaan Program Indonesia Pintar yang dilakukan setiap tahunnya	Deskriptif Kualitatif Teori: Implementasi Kebijakan	Implementasi Program Indonesia Pintar di SMP Kota Semarang terdapat beberapa permasalahan seperti Dinas Pendidikan Kota Semarang kesulitan mengetahui perkembangan pencairan dana Program Indonesia Pintar, selain itu permasalahan administrasi juga sangat dirasakan oleh panitia pelaksana dari sekolah, dengan demikian hal tersebut pula yang menyebabkan dana Program Indonesia Pintar mengendap di bank penyalur dan menyebabkan serapan dana Program Indonesia Pintar menjadi rendah Mengetahui permasalahan tersebut Dinas Pendidikan Kota Semarang memastikan tersedianya sumberdaya yang kompeten dan kapabel dengan komunikasi dan koordinasi yang dilakukan secara intens, kemudian tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dalam melakukan sosialisasi dan pelaksanaan Program Indonesia Pintar
4.	Rakista, P. M. (2020). Implementasi Program Indonesia Pintar pada tingkat	Program Indonesia Pintar pada tingkat Sekolah Dasar di Kabupaten Banyumas	Deskriptif kualitatif Teori: Implementasi kebijakan	Implementasi Program Indonesia Pintar pada tingkat Sekolah Dasar di Kabupaten Banyumas sudah berjalan dengan baik hal ini ditandai dengan proses pelaksanaan program yang dilakukan sesuai dengan tujuan dan SOP yang berlaku.

NO.	Peneliti / Tahun/ Judul	Fokus Kajian	Metode dan Teori	Hasil Penelitian
	Sekolah Dasar di Kabupaten Banyumas			
5.	Agusman, Y. (2019). Implementasi Program Indonesia Pintar di SD Negeri 1 Kolakaasi Kabupaten Kolaka	mengenai standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antar institusi dan konsolidasi aktivitas, karakteristik agen pelaksana, kondisi sosial, ekonomi dan politik dan disposisi implementor terhadap Program Indonesia Pintar di SD Negeri 1 Kolakaasi Kabupaten Kolaka	Deskriptif kualitatif Teori: Implementasi kebijakan	menunjukkan dari variabel ukuran dan tujuan kebijakan, belum sepenuhnya tercapai, karena masih ada siswa miskin belum menerima PIP. Sumber daya manusia sudah sesuai dengan syarat yang dibutuhkan, sumber daya dana mengalami keterlambatan pencairan dana PIP, dan ada masalah dalam pendistribusian dana PIP serta belum optimalnya pengawasan dana bagi penerima manfaat.
6.	Triana, Astuti, & Santoso, (2022). Determinan Implementasi Kebijakan Pemenuhan Hak Ketenagakerjaan Bagi Penyandang Disabilitas di Kota Semarang	Menganalisis faktor- faktor yang mempengaruhi ketepatan implementasi kebijakan	Deskriptif kualitatif Teori: Implementasi Keadilan Sosial	Masih terdapat tantangan mengenai ketepatan proses pelaksanaan kebijakan untuk menegakkan hak kerja difabel di Kota Semarang. Sebab, belum ada fungsi pengawasan, belum ada ULD (Unit Pelayanan Disabilitas), juga belum ada peraturan daerah yang mengatur perekrutan tenaga kerja penyandang disabilitas oleh Pemerintah Kota Semarang sendiri.

NO.	Peneliti / Tahun/ Judul	Fokus Kajian	Metode dan Teori	Hasil Penelitian
7.	Prasetyono, D. W. (2018). Implementasi Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) di SMA Negeri 2 Dumoga	Menganalisis faktor pendukung dan penghambat program Kartu Indonesia Pintar (KIP) di SMA Negeri 2 Dumoga	Deskriptif kualitatif Teori: Implementasi kebijakan	sasaran KIP di SMA Negeri 2 Dumoga khususnya untuk tahun 2015 tahap VI berjumlah 23 siswa yang seluruhnya memiliki KIP. Selain itu terdapat beberapa faktor pendukung seperti informasi dari pihak dinas secara rutin ke sekolah dan secara online dan faktor penghambat yaitu evaluasi dari program KIP yang dilaksanakan setiap periode program menyebabkan terjadinya perubahan pada mekanisme serta terjadinya penyelewengan dana KIP.
8.	Abiyyu, R N., (2023). Ketepatan Implementasi PERDA Kabupaten Wonosobo N0. 4 Tahun 2016 (Pasal 13 Tentang Penanganan Sampah)	Mengetahui ketepatan implementasi kebijakan serta dukungan dan hambatannya	Deskriptif kualitatif Teori: Ketepatan Kebijakan Implementasi kebijakan (Van Meter dan Van Horn)	Peraturan pengelolaan sampah di Kabupaten Wonosobo belum dilaksanakan dengan prosedur, tujuan, atau kebijakan yang tepat. Struktur dan tujuan kebijakan pengelolaan sampah, serta lingkungan sosial, ekonomi, dan politik, dianggap sebagai hambatan dalam implementasinya
9.	Edrial, E., Putrama, R., & Sujastiawan, A. (2022). Evaluasi Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) di Sma	Implementasi Program Kartu Indonesia Pintar Di Desa Isimu Selatan Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo.	Deskriptif kualitatif Teori: Implementasi kebijakan	Implementasi Program Kartu Indonesia Pintar Di Desa Isimu Selatan Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo belum efektif dilihat segi pendistribusian, pemanfaatan kartu indonesia pintar yang sulit di kontrol serta data yang tidak sinkron antara desa dan pemerintah. Maka diharapkan kepada pemerintah agar bisa mengoptimalkan dengan mensinkronkan data

NO.	Peneliti / Tahun/ Judul	Fokus Kajian	Metode dan Teori	Hasil Penelitian
	Negeri 1 Utan Tahun 2019-2020			penerima kartu indonesia pintar antara desa dan pemerintah agar penyaluran bisa tepat sasaran.
10.	Pesi, P., & Lanin, D. (2022). Implementasi Kebijakan Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Di Sekolah Dasar Negeri 11 Bancah Kecamatan Koto Parik Gadang Diatesh Kabupaten Solok Selatan	menganalisis implementasi kebijakan Program Kartu Indonesia Pintar (PIP) di Sekolah Dasar Negeri 11 Bancah Kecamatan Koto Parik Gadang Diatesh Kabupaten Solok Selatan.	Deskriptif kualitatif Teori: Implementasi kebijakan	tempat penelitian KIP yang telah memenuhi target, karena penetapan siswa penerima KIP sudah tepat dan tepat sasaran. Sumber daya manusia yang cukup dan kompeten dalam menjalankannya, karakteristik agen telah dengan penugasan yang penuh dengan ditetapkannya keadaan berprestasi tidak cukup dengan sekitar dan partisipan merespon terhadap anak yang menerima KIP.
11.	Balane et al.(2020). Strategi Implementasi Jaminan Kesehatan Nasional dengan Metode <i>Balanced Scorecard</i>	Analisis pemangku kepentingan dalam implementasi kebijakan kesehatan di negara-negara berkembang	Deskriptif kualitatif Teori analisis pemangku kepentingan Varvasovszky dan Brugh	Kerangka kerja untuk analisis pemangku kepentingan yang mencakup definisi, domain, dan indikator untuk menilai pengetahuan, kekuasaan, kepentingan, dan posisi pemangku kepentingan. Penelitian menekankan pentingnya memahami karakteristik pemangku kepentingan untuk memandu keterlibatan dan intervensi. Dalam konteks model implementasi, penelitian ini relevan dengan pendekatan bottom-up karena memperhatikan peran dan perspektif pemangku kepentingan di berbagai tingkat implementasi kebijakan.

NO.	Peneliti / Tahun/ Judul	Fokus Kajian	Metode dan Teori	Hasil Penelitian
12	Ahlers, AL, Heberer, T., & Schubert, G. (2016). Implementasi Kebijakan Di Negara Bagian Tiongkok	Efektivitas implementasi kebijakan di negara bagian Tiongkok	Deskriptif kualitatif analisis kebijakan, teori implementasi kebijakan	Implementasi kebijakan efektif di Tiongkok modern membutuhkan pendekatan hibrida antara model top-down dan bottom-up. Intervensi pemerintah pusat yang kuat harus diimbangi dengan fleksibilitas lokal untuk adaptasi dan inovasi kebijakan
13	Balane, M. A., Palafox, B., Palileo- Villanueva, L. M., McKee, M., & Balabanova, D. (2020). Implementasi Kebijakan; Pengembangan Kerangka Kerja Dan Ukuran Operasional	Penggunaan analisis pemangku kepentingan untuk penelitian implementasi kebijakan; pengembangan kerangka kerja dan ukuran operasional	Deskriptif kualitatif Teori analisis pemangku kepentingan Varvasovszky dan Brugha	Penelitian ini mengembangkan kerangka kerja untuk analisis pemangku kepentingan yang mencakup definisi, domain, dan indikator untuk menilai pengetahuan, kekuasaan, kepentingan, dan posisi pemangku kepentingan. Temuan menekankan pentingnya memahami karakteristik pemangku kepentingan untuk memandu keterlibatan dan intervensi. Penelitian ini juga menunjukkan bagaimana pendekatan ini dapat diterapkan dalam model implementasi top-down dan bottom-up untuk meningkatkan efektivitas kebijakan.
14	Kwartnik-Pruc, A., & Trembecka, A. (2021) Implementasi Kebijakan Ruang	Menganalisis apakah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah lokal pada tingkat perencanaan dan	Deskriptif kualitatif	penelitian ini mengidentifikasi distribusi dan aksesibilitas ruang hijau bagi penduduk kota, serta mengungkapkan pentingnya akuisisi lahan untuk meningkatkan area ruang hijau yang dapat diakses oleh masyarakat. Selain itu, penelitian ini memberikan

NO.	Peneliti / Tahun/ Judul	Fokus Kajian	Metode dan Teori	Hasil Penelitian
	Terbuka Hijau Publik: Studi Kasus di Krakow	administrasi dengan berkontribusi terhadap implementasi ruang terbuka hijau di daerah perkotaan, serta untuk mengevaluasi aktivitas pemerintah daerah dalam pengembangan ruang hijau publik	Teori ruang public Jurgen Habermas	wawasan tentang kebutuhan sumber daya keuangan yang diperlukan untuk pengembangan ruang hijau dan dapat menjadi referensi untuk penilaian kondisi ruang hijau di kota-kota lain di Polandia dan luar negeri
15	De Corte, J., Devlieghere, J., Roets, G., & Roose, R. (2019). Implementasi Kebijakan <i>Top-Down</i> dan Pekerja Sosial sebagai Lembaga Pengusaha	Menganalisis bagaimana para pekerja sosial menggunakan kemampuan mereka (<i>agency</i>) saat mengimplementasikan kebijakan tingkat atas sebagai birokrat garis depan dan aturan-aturan yang diambil dari kebijakan tersebut.	Deskriptif kualitatif <i>neo-institutional theory</i>	Penelitian mengidentifikasi cara manajer mendukung beberapa rasionalitas kebijakan seperti transparansi dan efisiensi, mereka juga menunjukkan perasaan campur aduk terhadap sistem informasi elektronik (Sistem Informasi Nasional untuk Sistem Intersektoral/INSISTO) yang diimplementasikan secara top-down, karena dianggap dapat menghambat otonomi profesional dan kualitas pelayanan mereka.

Sumber: Olahan Penulis (2024)

Penelitian terdahulu merupakan kerangka yang menjadi referensi yang digunakan sebagai bahan bacaan dan merupakan rujukan terhadap subjek penelitian, bahan perbandingan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, serta dapat membantu peneliti dalam menyusun penelitian agar menjadi sistematis. Dari beberapa penelitian terdahulu dapat diketahui bahwa terdapat beberapa penelitian yang berhubungan dengan program Indonesia pintar dalam pemberian dana bantuan program Indonesia pintar dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan mengurangi angka putus sekolah.

Sepuluh penelitian dari jurnal nasional terdahulu diketahui menerapkan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Tujuan penelitian tersebut adalah untuk menganalisis proses Implementasi Kebijakan khususnya. Sepuluh penelitian tersebut menggunakan berbagai macam pendekatan yang berbeda-beda. Peneliti juga menggunakan sumber jurnal nasional dengan tema dan fokus yang hampir sama dengan penelitian ini. Adanya penelitian-penelitian terdahulu ini dapat ditarik kesimpulan bahwa topik penelitian yang ditulis oleh peneliti memiliki beberapa kesesuaian dengan penelitian nasional. Penelitian kali ini memiliki kesamaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya karena yaitu memiliki fokus yang serupa yaitu menganalisis implementasi kebijakan. Persamaan selanjutnya mengenai metode penelitian yang digunakan yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan persamaan terakhir terdapat beberapa penelitian terdahulu

yang meneliti mengenai Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar. Kelima penelitian dari jurnal internasional diketahui menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan adanya jurnal internasional ini memiliki fokus dan tema yang sama mengenai implementasi kebijakan agar lebih sistematis mengenai analisis kebijakannya, penelitian terdahulu pada jurnal internasional terdapat beberapa penelitian yang berhubungan dengan program Indonesia pintar dalam pemberian dana bantuan program Indonesia pintar seperti adanya pendekatan model dari *top-down* dan *bottom-up* hal ini sama dengan pelaksanaan program Indonesia pintar dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah.

Perbedaan yang terlihat antara penelitian yang akan disusun oleh peneliti dengan penelitian-penelitian terdahulu terlihat pada teori yang digunakan, penelitian penulis menggunakan teori implementasi Daniel H. Mazmanian dan Paul A. Sabatier, sedangkan penelitian terdahulu menggunakan teori Edwards III dan Van Meter dan Van Horn, mengenai implementasi kebijakan.

1.6.2. Administrasi Publik

Secara etimologis, "administrasi" berasal dari bahasa Inggris "administration," yang berarti "mengelola" atau "mengadministrasikan." Dalam bahasa Belanda, istilah serupa adalah "administratie," mencakup manajemen, kegiatan organisasi, dan pengelolaan sumber daya. Manajemen memiliki peran penting di berbagai skala, sering diidentifikasi dengan kegiatan administratif yang

melibatkan pengelolaan informasi. Namun, konsep manajemen kini lebih luas, mencakup kolaborasi dalam aktivitas bersama untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Pendapat Yogi (2011), kata "publik" menyiratkan kepentingan yang bersifat umum. Dalam konteks ini, "publik" mengacu pada sesuatu yang bersifat umum dan berkaitan dengan masyarakat. Istilah ini menunjukkan bahwa setiap kalangan masyarakat tertuju pada rakyat secara umum.

Administrasi publik dalam mencapai suatu tujuan negara merupakan alat untuk melaksanakan kebijakan yang sudah ditetapkan oleh negara tersebut. Administrasi publik juga dapat memberikan pelayanan (manajemen) dan program-program (kebijakan) yang dapat bermanfaat kepada masyarakat. Administrasi Publik (Chandler dan Plano, 1988) merupakan suatu sumberdaya dan perangkat publik yang dapat dikoordinasikan untuk mengimplementasikan dan mengelola suatu kebijakan maupun publik. Administrasi publik dapat terlihat sebagai ilmu dan seni dimana memiliki untuk menyelesaikan tugas-tugas yang telah ditentukan. Ini merupakan bidang studi yang fokus pada penyelesaian permasalahan publik melalui perbaikan di berbagai aspek, termasuk organisasi, sumber daya manusia, dan keuangan. Pendapat lainnya mengenai administrasi publik menyatakan bahwa itu melibatkan pemahaman teori tentang ilmu hukum, sosial, politik, pelayanan, dan manajemen. Kemudian, teori tersebut diaplikasikan kepada masyarakat guna memenuhi kebutuhan mereka. Dengan demikian, administrasi publik menjadi suatu disiplin yang terkait erat dengan penerapan

konsep-konsep tersebut untuk mewujudkan kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat.

Nicholas Henry (1995:21-49), menuliskan perkembangan ilmu administrasi publik. Perkembangan tersebut disebut sebagai paradigma. Paradigma menjelaskan bahwa konsep yang sudah dijelaskan oleh para ahli, menjelaskan pada kondisi perkembangan ilmu pengetahuan atau sudut pandang suatu ilmu pengetahuan dengan yang memiliki suatu tujuan untuk menganalisis suatu peristiwa. Terdapat beberapa paradigma administrasi publik, diantaranya

Paradigma pertama administrasi publik, yaitu paradigma yang biasa dikenal dengan dikotomi politik administrasi pada abad ke-19 (1900-1926). Tokoh-tokoh dari paradigma tersebut adalah Frank J. Goodnow dan Lenand D. White yang menyatakan bahwa administrasi negara seharusnya berpusat pada birokrasi pemerintahan. Frank J. Goodnow, dalam tulisannya yang berjudul "Politics and Participation" pada tahun 1990, menjelaskan bahwa politik harus memberikan perhatian yang besar terhadap kebijakan agar sesuai dengan keinginan rakyat. Sementara itu, administrasi dijelaskan sebagai implementasi yang merupakan eksekusi dari kebijakan tersebut. Perbedaan yang sangat jelas antara politik dan administrasi dijelaskan dalam pembatasan peran antara badan legislatif, yang bertugas mendengarkan keinginan rakyat, dengan badan eksekutif yang bertugas menjalankan keinginan tersebut.

Paradigma kedua yang muncul pada tahun 1927-1937 mengembangkan prinsip-prinsip administrasi negara, perkembangan dalam administrasi negara

mencapai puncak reputasinya. Tokoh-tokoh dalam paradigma kedua ini melibatkan Mary Parker Follet, Henry Fayol, Frederick W. Taylor, dan Max Weber, yang memperkenalkan prinsip-prinsip administrasi sebagai fokus utama dalam administrasi publik. Puncak dari paradigma kedua terjadi pada tahun 1937 dengan tokoh Luther H. Gulick dan Lyndall Urwick, yang memperkenalkan konsep POSDCORB (Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting, Budgeting). Paradigma pertama dan kedua administrasi publik merupakan Teori Klasik Administrasi Publik, yang memiliki tugas kunci pemerintahan sebagai penyampai sejumlah pelayanan publik, seperti pembangunan sekolah, rumah, dan kesejahteraan serta politisi. Kritik dari teori klasik administrasi publik adalah penggunaan biaya dari hasil pajak yang dibayarkan tiap tahun kemudian dapat menjadikan suatu penyelenggaraan administrasi publik menjadi tidak efektif dan efisien.

Paradigma ketiga yang terjadi pada tahun 1950-1970, dikenal sebagai teori neoklasik. Pada paradigma ketiga, terjadi upaya untuk menetapkan kembali hubungan konseptual antara administrasi negara dengan ilmu politik. Dalam paradigma ini, administrasi negara dijelaskan sebagai bagian dari ilmu politik

Paradigma keempat terjadi pada tahun 1956-1970. Pada masa ini, administrasi negara dipandang sebagai ilmu administrasi yang mengembangkan prinsip manajemen secara ilmiah dan mendalam. Terdapat dua jenis administrasi negara, yaitu pengembangan ilmu administrasi murni yang didasari

oleh pengaruh psikologi sosial, dan ilmu administrasi yang menjelaskan mengenai *public policy*.

Paradigma kelima berkembang sejak tahun 1970, Pada paradigma ini, administrasi negara ditempatkan sebagai ilmu administrasi yang tidak hanya mengedepankan aspek ilmu murni tetapi juga sebagai pengembangan dari teori organisasi. Fokusnya mencakup bagaimana organisasi berfungsi dan perilaku individu dalam mengambil keputusan di dalam organisasi. Seiring berjalan waktu, paradigma ini berkembang menjadi ilmu kebijaksanaan (*policy science*), politik ekonomi, serta studi mengenai proses kebijakan pemerintah.

Paradigma keenam menjadi pembaharuan dalam penyelenggaraan administrasi publik yang memunculkan konsep *New Public Management*. Konsep inti dari New Public Management (NPM) muncul sebagai respons terhadap krisis negara yang dialami oleh beberapa negara seperti New Zealand, Australia, Inggris, dan Amerika. Krisis ini memicu perubahan dari sektor pribadi dan bisnis ke sektor publik. NPM didukung oleh promosi dari lembaga-lembaga seperti IMF, Bank Dunia, serta serikat persemakmuran dan kelompok konsultan manajemen. Dalam perkembangan ilmu administrasi, konsep administrasi sebagai *governance* menjadi lebih lengkap dalam menjelaskan masalah-masalah kontemporer. Administrasi publik, dalam konteks ini, tidak terbatas pada birokrasi dan lembaga pemerintah saja.

Penelitian ini menggunakan Paradigma **Governance** karena menekankan pada pentingnya keterlibatan banyak aktor dan kolaborasi dalam proses pengambilan

keputusan serta implementasi kebijakan publik. Paradigma ini relevan dengan konteks Program Indonesia Pintar (PIP) yang melibatkan berbagai pihak seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, sekolah, dan masyarakat dalam memastikan penyaluran dana pendidikan berjalan dengan efektif dan tepat sasaran. Prinsip transparansi dan akuntabilitas yang menjadi inti dari Governance sangat penting dalam implementasi PIP, karena program ini diawasi secara ketat untuk memastikan bahwa dana yang disalurkan benar-benar sampai ke penerima yang berhak. Selain itu, partisipasi publik yang menjadi elemen penting dalam paradigma ini juga tercermin melalui keterlibatan masyarakat, orang tua, dan guru dalam proses pengawasan serta evaluasi program. Paradigma governance juga mengedepankan efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan dana publik, yang dalam hal ini dilakukan melalui pengawasan dan evaluasi yang melibatkan banyak pihak untuk menghindari penyalahgunaan dana.

Paradigma Governance dalam PIP melibatkan berbagai pihak secara langsung untuk memastikan keberhasilan program. Pendekatan ini menangkap kompleksitas implementasi kebijakan publik, dimana partisipasi aktif semua pemangku kepentingan diperlukan untuk mencapai tujuan utama, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memastikan dana Program Indonesia Pintar digunakan secara efektif dan efisien.

1.6.3. Kebijakan Publik

Kebijakan yang memiliki tujuan yang dapat dilaksanakan oleh beberapa orang maupun kelompok yang nantinya memiliki hubungan untuk menyelesaikan suatu masalah Anderson (2006). Definisi lain mengenai kebijakan publik merupakan suatu kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah (Dye dan Rose, 2006), dari kedua definisi tersebut maka dapat disimpulkan terdapat beberapa konsep yang ada dalam kebijakan publik, diantaranya :

- Tindakan pemerintah yang memiliki wewenang
- Tindakan yang mengarahkan kepada tujuan dari kebijakan
- Tindakan yang dapat menentukan keputusan
- Pembuktian untuk membuat suatu rencana yang telah dirumuskan

Kebijakan Publik menurut Bridgman dan Davis dikutip oleh Sahya Anggara (2018 :36) mengungkapkan bahwa kebijakan memiliki tiga dimensi yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya yaitu tujuan (*objective*), pilihan tindakan legal dan sah secara hukum (*authoritative choice*), dan hipotesis (*hypothesis*). Definisi ini menekankan bahwa kebijakan tidak dibuat secara sembarangan karena memiliki tujuan tertentu yang ingin dicapai. Kebijakan dihasilkan oleh lembaga yang memiliki legitimasi dalam pemerintahan, dan proses perumusannya harus didasarkan pada teori, model, serta sebab dan akibat tertentu yang mendasarinya. Berdasarkan konsep-konsep tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah keputusan yang dibuat oleh pemerintah dan lembaga terkait lainnya

untuk memenuhi kepentingan masyarakat, serta memiliki legalitas dan keabsahan hukum.

Kebijakan publik melalui beberapa tahapan proses, dimulai dari perencanaan hingga evaluasi kebijakan. Menurut Anderson (1997), terdapat lima tahapan dalam proses kebijakan publik, yaitu:

- *Problem Formulation* (Formulasi Masalah), Proses ini melibatkan pengidentifikasian isu-isu yang berkembang sebagai dasar pembuatan kebijakan, serta cara memasukkan masalah-masalah yang telah diidentifikasi.
- *Policy Formulation* (Formulasi Kebijakan), Proses ini merupakan reaksi terhadap identifikasi masalah yang telah dilakukan. Tahap ini melibatkan pengembangan berbagai alternatif untuk mengatasi masalah tersebut, serta menentukan pihak-pihak yang akan terlibat dalam pelaksanaannya.
- *Adapting Formulation* (menentukan kebijakan), Proses ini melibatkan pemilihan dan penetapan alternatif paling efektif untuk dijadikan kebijakan.
- *Implementation* (Implementasi), Pada tahap ini, fokus utamanya adalah pada pihak-pihak yang akan melaksanakan kebijakan, termasuk tugas-tugas yang mereka lakukan serta konsekuensi yang mungkin timbul dari pelaksanaan kebijakan tersebut.
- *Evaluation* (Evaluasi), Tahap terakhir dalam proses kebijakan publik menurut Anderson adalah evaluasi. Evaluasi ini melibatkan pengukuran

tingkat keberhasilan kebijakan yang telah dilaksanakan, termasuk penilaian pelaku yang terlibat dan dampak yang timbul. Hasil evaluasi digunakan sebagai landasan untuk penyempurnaan kebijakan di masa mendatang.

1.6.4. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan adalah suatu tahapan yang diputuskan dalam suatu kebijakan yang dimana nantinya dapat memunculkan berbagai keputusan diantara orang-orang yang terkena dengan dampak dari kebijakan tersebut, implementasi kebijakan merupakan suatu tahapan yang menyeluruh baik dari proses maupun struktur yang melalui tahapan yang nantinya akan diketahui keberhasilan maupun kegagalannya untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan Agustino (2006), Definisi lain mengatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan salah satu bentuk tindakan yang dapat dilakukan oleh individu dan pejabat atau kelompok tertentu yang memiliki arahan untuk tercapainya suatu tujuan yang telah disepakati pada kebijakan (Metter dan Horn, 1975), dari ketiga penjelasan mengenai implementasi kebijakan menurut beberapa tokoh tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan menyangkut, tiga hal yaitu :

1. Adanya suatu tujuan dan sasaran dari kebijakan
2. Adanya suatu kegiatan untuk mencapai tujuan
3. Adanya manfaat maupun hasil dari kebijakan

Menurut Mazmanian dan Sabiter (Islmay, 2015 :21) terdapat pelaksanaan keputusan kebijakan dengan istilah yang dasar yaitu kebijakan publik dengan

beberapa keputusan seperti keputusan perundang-undangan dan keputusan eksekutif. Menurut Presman dan Wildavsky (Purwanto & Sulistyastusi, 2015 :120) implementasi kebijakan mencakup kebijakan yang sudah ditentukan ke dalam dokumen kebijakan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai bagi suatu organisasi tersebut. Menurut Grindle (Suparno, 2017 :13) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan adalah suatu kebijakan yang mengarah terhadap proses implementasi serta bergantung kepada jenis kepentingan dan bagaimana kebijakan tersebut dapat berdampak terhadap pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

1.5.4.1. Model Implementasi Kebijakan

- **Model implementasi Kebijakan Grindle**

Grindle (Suparno, 2017 :29) menjelaskan bahwa dalam penyelesaian atau pemecahan suatu masalah tergantung bagaimana kualitas dari isi dan pelaksanaan kebijakan tersebut direalisasikan, hal ini sesuai pada pemikirannya yang menjelaskan bahwa dalam kebijakan publik untuk mendapatkan suatu ide peningkatan maupun perubahan yang menuju ke arah positif baik dari kuantitas maupun kualitas. Konteks lain dari isi kebijakan adalah dua kondisi untuk mengetahui keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik mencapainya suatu tujuan dari kebijakan tersebut dan dapat berjalan secara optimal, tujuan tersebut terlihat dalam kebijakan publik yang diimplementasikan melalui program-program maupun kegiatan melalui beberapa indikator didalamnya.

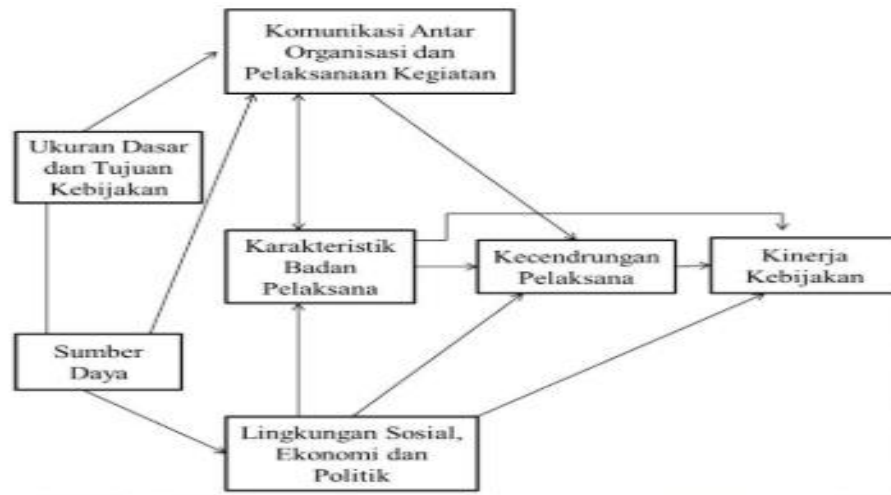


Gambar 1. 5 Implementasi Kebijakan Menurut Grindle

Sumber.Suparno (2017: 29)

Keberhasilan implementasi kebijakan publik sangat bergantung pada isi dari kebijakan tersebut, didalammnya memuat a) kepentingan yang dipengaruhi b) tipe b) manfaat c) derajat perubahan yang diharapkan d) letak dalam pengambilan keputusan e) pelaksanaan program f) sumber daya yang dilibatkan. Dalam proses pengimplemtasian, kebijakan juga dipengaruhi oleh beberapa konteks dalam implementasi yang terdiri dari a) kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat dan penguasa yang terkait c) kepatuhan dan pemahaman dalam kebijakan. Kemudian hasil yang ingin dicapai dalam implementasi program kebijakan yaitu a) dampak kepada masyarakat, individu maupun kelompok b) perubahan yang dapat diterima oleh masyarakat. Manusia sebagai sumber daya memiliki pengaruh penting dalam implementasi kebijakan karena tindakan mereka didasarkan pada pemahaman yang dimiliki.

- Model Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn



Gambar 1. 6 Implementasi Kebijakan Menurut Van Meter dan Van Horn

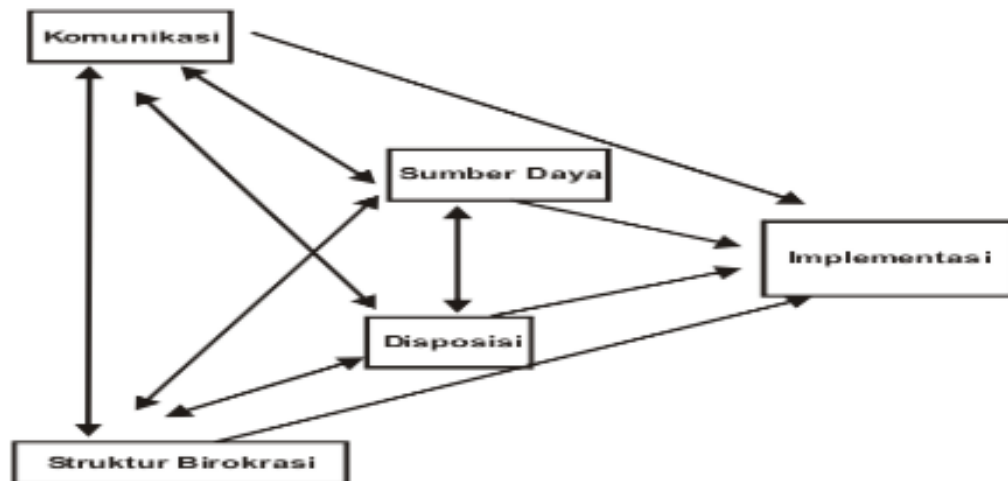
Sumber: Suparno, (2017: 32)

Van Meter dan van Horn (Suparno, 2017:32), kinerja pelaksana, kinerja kebijakan publik, berjalan secara linear. Hal ini dikarenakan kebijakan publik dalam pelaksanaannya dipengaruhi oleh a) aktivitas dari implementasi dan komunikasi dari antara stakeholder b) karakteristik dari setiap agen maupun aktor pelaksana/implementor c) kondisi sosial, ekonomi dan politik d) adanya kecenderungan dari implementor kebijakan, Van Meter dan Van Horn menjelaskan terdapat 6 fenomena yang dapat mempengaruhi hasil implementasi kebijakan yaitu a) standar dan sasaran kebijakan b) sumber daya c) komunikasi antar organisasi dan pelaksana d) sikap pelaksana e) karakteristik dari badan pelaksana f) lingkungan ekonomi, politik dan sosial.

Van Meter dan Van Horn menekankan pentingnya peran implementor (agen pelaksana) dalam proses implementasi kebijakan yang dilakukan secara top

down. Komunikasi yang dilakukan oleh implementor sangat penting karena berpengaruh pada respons masyarakat. Implementator memiliki peran kunci dalam menyampaikan standar dan tujuan kebijakan yang akan diimplementasikan. Keberhasilan dan kecenderungan implementator akan berdampak pada kinerja kebijakan publik, yang akhirnya menentukan apakah kebijakan tersebut berhasil atau gagal dalam pelaksanaannya.

- Model Implementasi Kebijakan George C. Edwards III



Gambar 1. 7. Implementasi Kebijakan Edwards III

Sumber. Agustinus (2006)

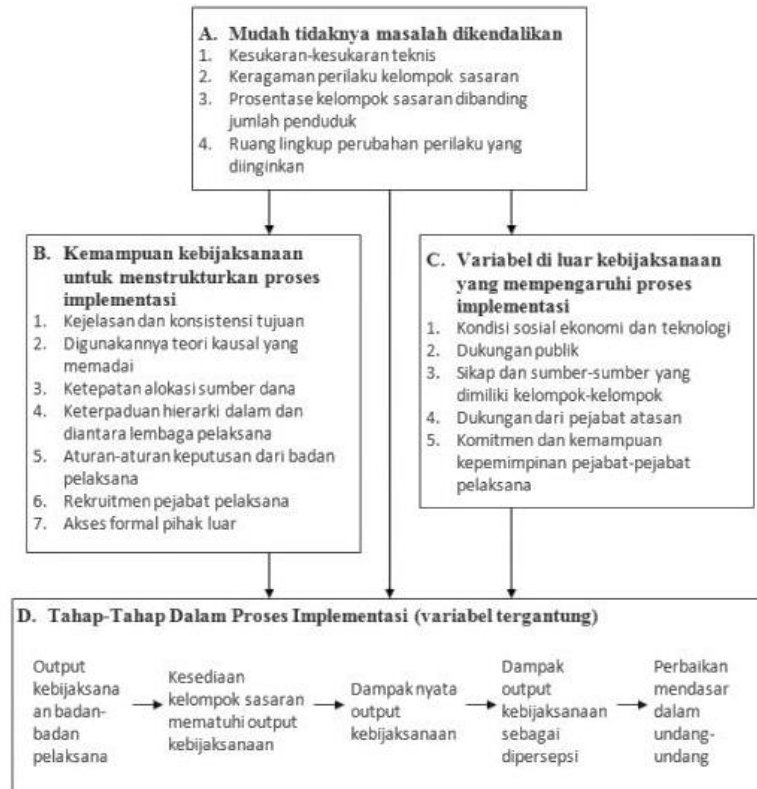
Edwards III menjelaskan bahwa terdapat empat fenomena yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan (Agustinus, 2006) yaitu :

- a. Fenomena komunikasi mempengaruhi efektivitas kebijakan publik selama proses pelaksanaannya. Efektivitas pelaksanaan kebijakan sangat bergantung pada seberapa baik komunikasi tersebut dilakukan, yang memerlukan pemahaman mendalam dari para pengambil keputusan. Terdapat tiga

indikator utama digunakan: transmisi berupa penyampaian informasi, kejelasan informasi yang mudah dipahami dan konsistensi pesan yang disampaikan tetap seragam dan tidak berubah.

- b. Fenomena sumber daya memiliki dampak signifikan terhadap keberhasilan penerapan kebijakan pemerintah. Kurangnya sumber daya dapat menghambat organisasi atau lembaga dalam melaksanakan kebijakan publik. Sumber daya yang dibutuhkan mencakup tenaga manusia, kekuasaan, dana, dan peralatan, yang semuanya mempengaruhi implementasi kebijakan.
- c. Fenomena sikap atau disposisi berhubungan dengan kepatuhan pelaksana dalam mengimplementasikan kebijakan. Keberhasilan pelaksana dalam menerapkan kebijakan juga bergantung pada sikap mereka.
- d. Fenomena struktur birokrasi berkaitan dengan kolaborasi dan protokol yang sangat mempengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan publik. Untuk memastikan implementasi kebijakan publik berjalan lancar dan konsisten, diperlukan dukungan dari struktur organisasi yang baik, prosedur operasi standar (SOP), dan pengaturan fragmentasi yang tepat.

- Model Implementasi Kebijakan Mazmanian dan Sabatier



Gambar 1. 8 Implementasi Mazmanian dan Sabatier

Sumber. Suparno (2007 :40)

Menurut Mazmanian dan Sabatier (Suparno, 2017: 40), implementasi kebijakan dapat dikelompokkan menjadi empat fenomena. Fenomena pertama menitikberatkan pada kompleksitas permasalahan, dengan mempertimbangkan kesulitan teknis, variasi karakteristik target kebijakan, proporsi kelompok sasaran terhadap total penduduk, dan lingkup perilaku yang terlibat. Fenomena kedua mempertimbangkan kejelasan dan konsistensi tujuan, penerapan teori sebab-akibat yang tepat, alokasi sumber daya yang akurat, integrasi hierarki di dalam dan antar lembaga pelaksana, prosedur pengambilan keputusan lembaga

pelaksana, seleksi pejabat pelaksana, dan akses resmi terhadap pihak eksternal. Dengan memperhatikan indikator-indikator ini, kebijakan dapat mengatur proses implementasi dengan lebih terstruktur.

Indikator fenomena ketiga termasuk kondisi sosial ekonomi dan teknologi, dukungan masyarakat, sikap dan sumber daya kelompok, dukungan dari pejabat atasan, dan komitmen serta keterampilan kepemimpinan pejabat pelaksana. Sementara itu, tahapan proses implementasi merupakan fenomena keempat, dengan indikator seperti keluaran kebijakan lembaga pelaksana, kesediaan kelompok sasaran untuk mematuhi keluaran kebijakan, dampak aktual dan dirasakan dari keluaran kebijakan, serta perubahan mendasar terhadap undang-undang. Model implementasi kebijakan publik Mazmanian dan Sabatier menyoroti fenomena yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik.

- Model Implementasi dengan pendekatan *Top Down*

Pendekatan top down dalam pelaksanaan kebijakan menekankan bahwa atasan memberikan perintah kepada bawahan untuk melaksanakan kebijakan birokrasi. Menurut Sabatier (Rulinawaty, 2013), pendekatan ini dimulai dengan penetapan keputusan kebijakan dan dilanjutkan dengan mengevaluasi sejauh mana kebijakan tersebut mencapai tujuannya dari segi hukum dari waktu ke waktu. Pendekatan ini juga disebut sebagai "*Policy Centered*" karena fokusnya pada kebijakan dan evaluasi apakah kebijakan tersebut mencapai tujuan yang diharapkan saat dilaksanakan menurut Hogwood & Gunn (Rulinawaty, 2013).

- Model Implementasi dengan pendekatan *Bottom Up*

Pendekatan yang menekankan pada pengkajian faktor-faktor dari level bawah muncul karena ketidakpuasan terhadap pendekatan top-down yang sering dianggap menyederhanakan masalah dan mengabaikan efektivitas implementasi kebijakan. Pendekatan ini memandang implementasi kebijakan sebagai proses yang kompleks, melibatkan lebih dari sekadar efisiensi dan efektivitas. Para penganut pendekatan bottom up ini mencoba untuk menekankan mengenai pentingnya memperhatikan aspek lain yang cukup penting dalam suatu implementasi salah satunya birokrat pada level bawah (*street level bureaucrat*) dan kelompok sasaran dari suatu kebijakan (*target group*) (Rulinawaty, 2013). Implementasi kebijakan mempunyai beberapa model yang terdiri dari pendekatan *top down* dan *bottom up*.

1.5.4.2. Ketepatan Implementasi Kebijakan Publik

Proses implementasi kebijakan menurut Nugroho (2021: 51-53) menjelaskan bahwa menampilkan efektifitas kebijakan dalam proses implementasi itu penting. Efektifitas pelaksanaan kebijakan dijelaskan melalui beberapa ketepatan dalam implementasi, diantaranya:

1. Ketepatan kebijakan

Kebijakan yang diambil harus terlihat dari sisi kebijakan tersebut apakah dapat menyelesaikan suatu permasalahan yang akan dipecahkan. Kebijakannya juga dilihat dari lembaga yang membuat suatu kewenangan tersebut dalam sebuah

kebijakan yang kemudian diformulasikan sesuai dengan sifat masalah yang akan dihadapi.

2. Ketepatan pelaksanaan

Kebijakan yang mengarah kepada stakeholder yang dan melibatkan pemerintah, swasta dan masyarakat dalam bekerja sama dengan berbagai pihak sehingga dapat memberikan tanggung jawab dalam pelaksanaan suatu kebijakan sepenuhnya kepada masyarakat

3. Ketepatan Target

Target yang ditetapkan mencakup beberapa hal, yaitu :

- Kesesuaian target di lapangan yang telah ditentukan, yang ditentukan berasal kebijakan yang telah ditentukan
- Adanya tumpang tindih target yang telah dilakukan, merujuk kepada sasaran tersebut saling bertentangan atau dapat menghalangi tercapainya target yang diinginkan.
- Adanya konflik dengan target dari kebijakan lainnya, tujuan yang ingin dicapai oleh suatu kebijakan bertentangan, beririsan secara negatif, atau saling menghambat dengan sasaran atau tujuan yang ingin dicapai oleh kebijakan lain.

4. Ketepatan Lingkungan

Menurut Donald J (Nugroho, 2021) terdapat dua lingkungan yang dapat menentukan implementasi kebijakan, yaitu:

- Kekuasaan sumber kewenangan kebijakan, merupakan bentuk dari jaringan kelompok yang terkena dampak dari kebijakan baik masyarakat maupun pemerintah, serta terjadi proses penawaran dalam pengambilan kebijakan dan jaringan yang terlibat dalam implementasi tersebut dapat membentuk lingkungan internal kebijakan baik.
- Kesan masyarakat terhadap kebijakan dan penerapannya, merupakan suatu penafsiran kebijakan dari lembaga yang dapat mempengaruhi masyarakat, individu yang dapat memberikan dampak yang signifikan dalam penerapan suatu kebijakan untuk membentuk lingkungan eksternal kebijakan.

5. Ketepatan Proses

Implementasi Kebijakan terdiri dari 3 proses, yaitu:

- *Policy acceptance*, merupakan kebijakan yang dilihat masyarakat sebagai aturan yang dibutuhkan di masa yang akan datang, sedangkan menurut pemerintah tugas tersebut harus segera diselesaikan, mulai dari tahap perencanaan, hingga tahap pemantauan
- *Policy adoption*, pengambilan kebijakan yang dilihat masyarakat sebagai aturan yang dibutuhkan untuk masa yang akan datang sedangkan bagi pemerintah sebagai tugas yang harus diselesaikan
- *Strategic readiness*, kebijakan yang membuat masyarakat untuk berpartisipasi sedangkan bagi pemerintah hanya sebagai pelaksana.

1.5.4.3. Pemilihan Model Implementasi Kebijakan Publik berdasarkan Pemetaan Model

Febrianti (2017 :39) menjelaskan mengenai pemahaman dalam model Implementasi kebijakan yang dapat dilakukan untuk pemetaan model implementasi. Dalam model implementasi kebijakan, top-down menandakan bahwa kebijakan dibuat oleh pemerintah dan kemudian dijalankan oleh masyarakat, sementara bottom-up menunjukkan bahwa kebijakan dibuat atau diinisiasi oleh masyarakat dan kemudian diterapkan oleh pemerintah. Penelitian tersebut menggunakan teori Mazmanian dan Sabatier untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Program Indonesia Pintar di Kecamatan Banyumanik.

Teori dari Mazmanian dan Sabatier digunakan dalam penelitian ini karena memiliki fenomena yang selaras untuk menilai faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi Program Indonesia Pintar di Kecamatan Banyumanik. Teori tersebut dapat melengkapi satu sama lain sehingga saling mendukung fenomena yang hendak dicari di dalam penelitian ini.

1. Karakteristik dari masalah

a. Kesulitan teknis

Permasalahan yang terjadi di Kecamatan Banyumanik, mengenai penerimaan adanya Program Indonesia Pintar ini, apakah menjadi cara untuk mengurangi angka putus sekolah yang sulit untuk diselesaikan

b. Keberagaman perilaku kelompok sasaran

merupakan faktor eksternal yang dilihat dari pembuatan suatu kebijakan terhadap kesesuaian dari pendapatan orang tua wali murid, dalam implementasi Program Indonesia Pintar di Kota Semarang.

c. Tingkat perubahan yang dikehendaki

Pihak terkait Program Indonesia Pintar dalam mengelola untuk pencapaian target dari kelompok sasaran yang diharapkan dengan adanya pemberian Program Indonesia Pintar berdasarkan 10 Tahun 2020 tentang Pemberian Program Indonesia Pintar di Kecamatan Banyumanik.

2. Dukungan Politik

a. Kejelasan dan konsisten tujuan, keberhasilan

Kebijakan yang didukung dengan isi yang jelas akan mempermudah sebuah kebijakan khususnya Program Indonesia Pintar dan akan menghindari terjadinya suatu

penyimpangan dalam pengimplementasiannya, seperti halnya implementasi kebijakan Program Indonesia Pintar

b. Ketepatan alokasi sumber dana

Mendukung suatu kebijakan adalah masalah keuangan atau modal. Setiap program pasti membutuhkan staf untuk mengerjakan tugas-tugas administrasi dan teknis, memantau program, dan mengelola sumber daya lainnya yang sangat memerlukan dana.

c. Keterpaduan hirarki dalam dan diantara lembaga pelaksana

Kebijakan dapat dikatakan berhasil jika koordinasi yang baik dilakukan antara berbagai instansi terkait baik secara vertikal maupun horizontal.

d. Aturan-aturan pembuat keputusan dari badan pelaksana

Badan atau implementor yang memberikan penjelasan mengenai kebijakan Indonesia Pintar dengan aturan yang jelas dan konsisten agar tidak terjadi penyimpangan khususnya di Kecamatan Banyumanik Kota Semarang.

e. Akses formal pihak luar,

Suatu program akan diberi dukungan yang teramat penuh ketika kelompok-kelompok luar, apabila adanya sosialisasi

mengenai Program Indonesia pintar di Kecamatan Banyumanik.

3. Tahapan Implementasi

1) Kondisi sosial, ekonomi dan teknologi

Kondisi sosial, politik dan ekonomi merupakan faktor eksternal dalam implementasi kebijakan Program Indonesia Pintar di Kota Semarang. Penelitian ini akan melihat lingkungan eksternal yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan Program Indonesia Pintar berdasarkan 10 Tahun 2020 tentang Pemberian Program Indonesia Pintar di Kecamatan Banyumanik.

2) Dukungan Publik

Dukungan publik biasanya akan tinggi ketika kebijakan yang dikeluarkan memberikan insentif atau kemudahan, seperti hukuman yang diberikan dalam pencapaian target keberhasilan implementasi.

3) Sikap dan sumber-sumber yang dimiliki kelompok pemilih

Kelompok pemilih mempengaruhi implementasi kebijakan dengan: 1) mengintervensi keputusan badan pelaksana melalui komentar untuk mengubah kebijakan, dan 2) memengaruhi badan pelaksana secara tidak langsung melalui kritik publik serta pernyataan kepada badan legislatif.

4) Dukungan dan pejabat atasan

Dukungan dari pejabat yang lebih tinggi terhadap pelaksanaan kebijakan Program Indonesia Pintar biasanya berupa dukungan moral dan material.

5) Komitmen dan keterampilan pejabat pelaksana

Komitmen aparat pelaksana dalam merealisasikan tujuan kebijakan merupakan variabel yang sangat krusial. Mereka harus memiliki keterampilan dalam menetapkan prioritas tujuan dan merealisasikannya.

Daniel H. Mazmanian dan Paul A. Sabatier menunjukkan bahwa proses implementasi ditentukan oleh seberapa mudah masalah dapat dikendalikan, kemampuan kebijakan dalam menyusun proses implementasi, dan variabel eksternal yang mempengaruhi proses tersebut. Alasan penulis menggunakan teori Daniel H. Mazmanian dan Paul A. Sabatier, karena model pendekatan *top-down*, di mana keputusan dibuat secara sepihak dari atas ke bawah oleh pemerintah yang berperan sebagai aktor kunci dalam proses tersebut. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Semarang Khususnya Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 1 Provinsi Jawa Tengah serta instansi terkait harus mampu menjalankan kebijakan tersebut dengan baik untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

Peneliti memilih Teori Implementasi Kebijakan Mazmanian dan Sabatier sangat cocok untuk menganalisis implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) SMA yang berada di Kecamatan Banyumanik karena fokusnya pada kompleksitas implementasi kebijakan. Dengan teori ini, peneliti dapat mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi jalannya implementasi, termasuk peran aktor, struktur organisasi, dan dinamika politik lokal. Fleksibilitas teori ini memungkinkan peneliti untuk memahami bagaimana PIP dijalankan, dampaknya terhadap masyarakat dan sistem pendidikan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi tersebut. Penerapan teori ini melibatkan pengumpulan data yang komprehensif melalui observasi, wawancara, dan analisis dokumen untuk melacak dan menganalisis proses implementasi dari awal hingga akhir, serta mengevaluasi dampak yang dihasilkan. Dengan demikian, Teori Implementasi Kebijakan Mazmanian dan Sabatier memberikan kerangka yang kokoh dan relevan untuk menganalisis dan memahami secara menyeluruh proses implementasi PIP SMA yang berada di Kecamatan Banyumanik, serta kontribusinya terhadap pencapaian tujuan pendidikan yang diinginkan oleh pemerintah.

1.6.5. Program Indonesia Pintar

Program yang dibuat pemerintah mengenai jaminan sosial di bidang pendidikan, Program Indonesia Pintar (PIP) mempunyai tujuan untuk mengatasi persoalan yang ada di masyarakat khususnya dalam bidang pendidikan bagi masyarakat yang kurang mampu. Program Indonesia Pintar ini merupakan bagian dari upaya dalam mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai yang tertuang pada pembukaan UUD 1945 yang menjelaskan mengenai upaya pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan masyarakat, selain itu Program Indonesia Pintar merupakan inisiatif nasional pada RPJMN 2015-2019, menurut tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).

Permendikbud Nomor 10 Tahun 2020 mengenai Program Indonesia Pintar, menjelaskan bahwa program Indonesia Pintar ini merupakan bentuk keberlanjutan dari Program Bantuan Siswa Miskin (BSM), dengan memberi bantuan dana dari pemerintah kepada siswa yang berada pada keluarga yang kurang mampu dalam membayar biaya sekolah anak mereka

Bantuan yang diberikan dari Program Indonesia Pintar digunakan oleh masyarakat yang kurang mampu sebagai bentuk pemenuhan biaya pendidikan mereka sesuai dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Kemendikbud Ristek Nomor 7 Tahun 2021 mengenai Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar. Tujuan dari Program Indonesia Pintar dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Program Pintar, yaitu Program Indonesia Pintar memiliki tujuan yaitu :

a. Bagi pendidikan dasar dan pendidikan menengah

- meningkatkan akses bagi peserta didik mulai dari usia 6 (enam) tahun sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun untuk mendapatkan pelayanan pendidikan sampai taman dan wajib belajar 12 (dua belas) tahun
- mencegah peserta didik untuk kemungkinan tidak melanjutkan pendidikan atau putus sekolah diakibatkan kondisi finansial yang kurang
- membuat siswa yang putus sekolah untuk kembali melanjutkan pendidikannya

b. Bagi perguruan tinggi

- meningkatkan kesempatan belajar bagi mahasiswa perguruan tinggi yang tidak mampu secara kondisi ekonomi
- meningkatkan kualitas dan prestasi mahasiswa baik dibidang akademik maupun non akademik
- menjamin keberlangsungan kondisi Mahasiswa yang berasal dari daerah tertinggal, terluar maupun yang terkena konflik sosial atau bencana
- meningkatkan angka partisipasi pendidikan

1.7. Kerangka Pikir Penelitian

Regulasi

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar
2. Peraturan Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
3. Peraturan Daerah Kota Semarang No 1 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan Pendidikan di Kota Semarang

Identifikasi Masalah

1. Perbedaan persepsi mengenai manfaat dari Program Indonesia Pintar di setiap kelurahan yang ada di Kecamatan Banyumanik yang berdampak terhadap peningkatan angka putus sekolah
2. Penerbitan Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang diterapkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi belum terealisasi secara maksimal di Kecamatan Banyumanik
3. Terdapat fluktuasi penerima bantuan dikarenakan ketidaksesuaian target di SMA Kecamatan Banyumanik
4. Terdapat kendala dalam proses pencairan bantuan PIP yang dapat menghambat implementasi Program Indonesia Pintar
5. Terbatasnya pemahaman masyarakat mengenai Program Indonesia Pintar sebagai salah satu upaya

Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) di SMA Kecamatan Banyumanik Kota Semarang?
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) di SMA Kecamatan Banyumanik Kota Semarang?

Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan implementasi Program Indonesia Pintar di SMA Kecamatan Banyumanik Kota Semarang
2. Mendeskripsikan Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) di SMA Kecamatan Banyumanik Kota Semarang

Ketepatan Implementasi Kebijakan Publik (Nugroho, 2021: 51-53)

1. Ketepatan Kebijakan
2. Ketepatan Pelaksana
3. Ketepatan Target
4. Ketepatan Lingkungan
5. Ketepatan Proses

Faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan Teori dari Mazmanian dan Sabatier

1. Karakteristik dari masalah
2. Dukungan Politik
3. Tahapan Implementasi

1.8. Operasional Konsep

Penelitian ini menggunakan konsep implementasi kebijakan dalam Program Indonesia Pintar untuk mengatasi masalah pendidikan di Kota Semarang menurut Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah.

Program Indonesia Pintar merupakan program yang diberikan oleh pemerintah berupa bantuan berupa uang tunai yang akan diberikan kepada peserta didik, program ini merupakan keberlanjutan dan upaya perluasan dari Program Bantuan Siswa Miskin (BSM), program ini diluncurkan pada tanggal 3 November 2014, hal ini sesuai dengan yang tertera dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Program Indonesia Pintar.

Pentingnya implementasi dalam kebijakan Program Indonesia Pintar sesuai dengan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 34 ayat (2) yang berbunyi “Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya”. Regulasi tersebut berkaitan dengan Permendikbud Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Program Indonesia Pintar Pasal 1 Ayat (1) yang berbunyi “Program Indonesia Pintar yang selanjutnya disingkat PIP adalah bantuan berupa uang tunai, perluasan akses, dan kesempatan belajar dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik dan mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin untuk membiayai Pendidikan”.

Program Indonesia Pintar memiliki tujuan untuk mengatasi angka putus sekolah di Indonesia dengan mengevaluasi implementasi Program Indonesia Pintar (PIP). Program ini dirancang untuk membantu siswa kurang mampu agar tetap bersekolah, sesuai dengan amanat UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Penelitian ini juga mengidentifikasi hambatan dalam penyaluran bantuan Program Indonesia Pintar dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas Program Indonesia Pintar yang diharapkan dapat meningkatkan akses Pendidikan bagi peserta didik dari keluarga yang kurang mampu.

Penulis menggunakan operasionalisasi konsep untuk mempermudah penulis dalam menentukan cara berpikir dan penyesuaian teori tentang Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar di SMA Kecamatan Banyumanik Kota Semarang, adapun operasionalisasi konsep yang akan diteliti yaitu :

Tabel 1. 11 Operasionalisasi Konsep

Fenomena	Sub fenomena	Gejala yang diamati
Ketepatan Kebijakan	Kesulitan Teknis	• Masalah yang dihadapi dalam penerapan Program Indonesia Pintar di Kecamatan Banyumanik • Keterbatasan Sumber daya untuk mengatasi permasalahan PIP
	Variasi karakteristik Kebijakan	• Perbedaan kebutuhan dan preferensi dari SMA, Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 1 Provinsi Jawa Tengah, Kelurahan Srandol Wetan • Perbedaan aksesibilitas terhadap PIP di SMA Kecamatan Banyumanik
	Kelompok sasaran	• Pengaruh SMA terkait implementasi PIP di Kecamatan Banyumanik • Peran Kelurahan dalam menyebarkan informasi PIP

Fenomena	Sub fenomena	Gejala yang diamati
Ketepatan Pelaksana	Ketepatan aktor pelaksana kebijakan	• Pemahaman instansi dalam penerapan Program Indonesia Pintar di Kecamatan Banyumanik • Alokasi sumber daya sudah sesuai dengan tujuan atau belum
	Pembagian tugas dan tanggung jawab	• Koordinasi antara SMA di Kecamatan Banyumanik, Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 1 Provinsi Jawa Tengah dan Kelurahan Srandol Wetan
Ketepatan Target	Prosedur pengambilan keputusan	• Proses pengambilan keputusan yang jelas dan konsisten oleh lembaga pelaksana PIP • Prosedur Pendaftaran PIP dapat dipahami oleh instansi terkait maupun masyarakat yang menerima bantuan
Ketepatan Lingkungan	Dukungan masyarakat	• Tingkat partisipasi Masyarakat dengan adanya PIP di Kecamatan Banyumanik • Kesadaran Masyarakat di Kelurahan Srandol Wetan terhadap PIP
	Sikap sumber daya	• Ketersediaan petugas instansi dalam pengembangan ide-ide PIP • Ketersediaan fasilitas dalam menjalankan PIP
	Dukungan Stakeholder terkait/atasan	• Arahan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 1 Provinsi Jawa Tengah terkait pengaruh Program Indonesia Pintar • Kemampuan instansi terkait alokasi anggaran PIP yang bervariasi
Ketepatan Proses	Kesiapan Pelaksana dalam menjalankan kebijakan	• Pengelola PIP pada tingkat provinsi berupa sumber data calon peserta didik pemegang KIP dan mekanisme pengolahan data calon penerima PIP
		• Mekanisme pelaksanaan PIP berupa cara mendapatkan KIP, penetapan penerima dana, penyaluran dana dan pencairan dana PIP
		• Pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara internal oleh Sekolah dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah

1.9. Argumen Penelitian

Argumen penelitian menjawab rumusan masalah penelitian berdasarkan teori-teori yang akan digunakan dalam penelitian ini berdasarkan kerangka pemikiran teoritis. Dalam implementasinya angka penyaluran dana Program Indonesia Pintar ke peserta didik SMA di Kecamatan Banyumanik Kota Semarang, karena ditemukan adanya angka yang fluktuatif penerima Program Indonesia Pintar sejak tahun 2021-2023 hal ini dibuktikan dengan data penerima PIP di beberapa SMA yang berada di Kecamatan Banyumanik. Kondisi ini disebabkan karena dalam verifikasi dan validasi data penerima PIP. Ditemukan bahwa adanya keterbatasan sumber daya untuk pengecekan langsung kepada calon penerima PIP dan Kekurangan informasi yang jelas berupa sosialisasi mengenai program PIP juga menyebabkan beberapa siswa yang seharusnya berhak tidak mendaftar atau tidak tahu cara mendapatkan bantuan ini Program Indonesia Pintar. Hal tersebut disebabkan karena belum optimalnya implementasi PIP dengan pembuat kebijakan, kelompok sasaran, hingga kelompok kepentingan. Kelurahan memiliki peran penting dalam pendataan, pendampingan, dan pemantauan keluarga penerima manfaat. Melalui peran aktifnya, Kelurahan dapat lebih efektif memahami dan mengatasi tantangan yang dihadapi oleh kelompok sasaran, terutama anak-anak dari keluarga kurang mampu. Dalam banyak kasus, biaya pendidikan menjadi penghalang utama bagi keluarga berpenghasilan rendah untuk mengirim anak-anak mereka ke sekolah. Program Indonesia Pintar (PIP) bertujuan untuk memastikan bahwa siswa dari keluarga kurang mampu tetap

mendapatkan akses pendidikan, termasuk menarik kembali siswa yang sudah putus sekolah atau tidak melanjutkan pendidikan.

Permendikbud No. 10 Tahun 2020, Pasal 2 Ayat (3), yang berbunyi “menarik siswa putus sekolah (drop out) atau tidak melanjutkan agar kembali mendapatkan layanan pendidikan di sekolah, sanggar kegiatan belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, lembaga kursus dan pelatihan, satuan pendidikan nonformal lainnya, atau balai latihan kerja”. Program ini sangat relevan di daerah seperti Kecamatan Banyumanik, di mana kondisi ekonomi masyarakat bervariasi dan masih banyak siswa yang berjuang untuk mendapatkan pendidikan yang layak.

Keberhasilan PIP dalam menurunkan angka putus sekolah tidak hanya bergantung pada penyaluran bantuan, tetapi juga pada efektivitas komunikasi dan sosialisasi tentang program tersebut. Jika informasi mengenai PIP tidak tersebar luas atau tidak dipahami oleh masyarakat, maka tujuan program ini akan sulit tercapai. Oleh karena itu, peran pemerintah daerah dan instansi terkait dalam memberikan informasi yang jelas dan mendukung proses pendaftaran sangat penting, nantinya akan menciptakan generasi yang tidak hanya memiliki keterampilan *hardskill*, tetapi juga *softskill* yang dibutuhkan untuk bersaing di dunia kerja yang semakin kompetitif. Melalui pendidikan yang lebih baik, diharapkan akan ada penurunan angka kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, yang pada akhirnya dapat membantu memutus siklus kemiskinan yang ada.

1.10. Metode Penelitian

1.10.1. Desain Penelitian

Metode penelitian yang dijelaskan oleh Sofyan Safri Harahap merupakan bentuk dari proses tentang bagaimana proses memperoleh, merumuskan dan menyajikan kebenaran dari objek atau fenomena yang akan diteliti, definisi lain mengenai metode penelitian menurut Ibnu Hadjar merupakan suatu teknik untuk mengumpulkan serta menganalisis berbagai informasi yang dapat memajukan pengetahuan (Rahmadi, 2011: 6)

Penulis pada penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Lexy J. Meleong (Candra Guzman dan Oktarina, 2018) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif merupakan studi yang memiliki tujuan untuk memahami suatu subjek dalam penelitian. Penelitian ini tidak dapat dimanipulasi dan menggunakan penelitian deskriptif yang menafsirkan suatu keadaan sosial terhadap masalah yang akan diteliti secara ilmiah. Teknik deskriptif ini dilakukan untuk menganalisis suatu objek, kelompok, maupun keadaan dari beberapa perangkat atas ruang kejadiannya pada saat ini, menurut (Nazir, 2013: 43). (Aulia & Yulianti, 2019)

Desain dari penelitian kualitatif deskriptif ini memiliki tujuan untuk menjelaskan kondisi di lapangan dengan menghubungkan sebab akibat terjadinya masalah tersebut serta untuk memperoleh gambaran secara realitas mengenai implementasi Program Indonesia Pintar di SMA Kecamatan Banyumanik Kota Semarang.

1.10.2. Situs Penelitian

Situs penelitian merupakan lokasi yang dipilih berdasarkan kesesuaian dengan permasalahan yang akan diuji sebagai tempat maupun wilayah penelitian akan dilakukan menurut (Hardani, 2020). Peneliti menentukan situs atau lokasi penelitian di Kecamatan Banyumanik, SMA 4 Kota Semarang, SMA 9 Kota Semarang, SMA Mardisiswa, Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 1 Provinsi Jawa Tengah dan Kelurahan Srandol Wetan. Hal ini dilakukan oleh peneliti karena pada Cabdin Wilayah 1 yang memiliki tanggung jawab terhadap pelaksanaan PIP khususnya di Kota Semarang, Kecamatan Banyumanik SMA 4, SMA 09 dan Mardisiswa memiliki penerima PIP yang cukup signifikan dan Kelurahan Srandol Wetan berada di wilayah sekolah tersebut.

Penelitian ini yang berlokasi di Kecamatan Banyumanik Kota Semarang, dipilih oleh peneliti sebab Kecamatan Banyumanik memiliki Jumlah Sekolah Menengah Atas yang banyak dibandingkan kecamatan yang lain di Kota Semarang selain itu, peneliti ingin melakukan pengkajian lebih dalam lagi pada permasalahan di wilayah tersebut. Selain itu, peneliti juga berharap dapat menemukan sebuah penemuan yang dapat membantu dalam memecahkan masalah dari permasalahan yang terjadi pada Program Indonesia Pintar.

1.10.3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan pihak yang akan diteliti atau narasumber untuk mendapatkan informasi mengenai data penelitian (Sugiyono, 2019)

sebagai suatu hal yang penting kedudukannya, sehingga digunakan dalam pengumpulan data baik berupa benda maupun manusia. Pada penelitian ini, dibutuhkan informasi Staf Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 1 Jawa Tengah, Guru BK SMA 4 Kota Semarang, Guru BK SMA 9 Kota Semarang, Guru BK SMA Mardisiswa, wakil kepala sekolah bidang kesiswaan SMA Mardisiswa dan PLT Kelurahan Srandol Wetan, yang terkait dengan Implementasi Program Indonesia Pintar pada jenjang Sekolah Menengah Atas di Kecamatan Banyumanik diantaranya yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. Penanggungjawab Program Indonesia Pintar di SMA 4 Kota Semarang, SMA 09 Kota Semarang, SMA Mardisiswa, dan Wali murid siswa SMA.

1.10.4. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan jenis data berupa, tulisan, kalimat-kalimat penjelas, maupun pendeskripsian mengenai fakta yang terjadi di lapangan sehingga dengan kata lain maka data yang digunakan pada penelitian ini merupakan bentuk deskriptif menurut (Sugiyono, 2020)

1.10.5. Sumber Data

Penelitian yang berjudul “Implementasi Program Indonesia Pintar di SMA Kecamatan Banyumanik Kota Semarang” menggunakan sumber data primer dan sekunder, dengan beberapa penjelasan, diantaranya :

a. Data Primer

Data primer dijelaskan sebagai suatu sumber data yang diberikan secara langsung kepada pengumpul data menurut Sugiyono (2006 : 137). Data yang diperoleh merupakan data yang diolah secara sendiri maupun langsung dari objeknya (Imron, 2019). Dalam hal ini dijelaskan bahwa data yang diperoleh merupakan data yang didapatkan secara langsung dari hasil wawancara dengan subjek peneliti yaitu informan yang mengetahui tentang Program Indonesia Pintar di Kecamatan Banyumanik Kota Semarang.

b. Data Sekunder

Data sekunder dijelaskan sebagai sumber yang secara tidak langsung memberikan data kepada pengumpul menurut Sugiyono (2006 :137). Data yang dimaksud berupa data yang didapatkan dan bersumber dari objek dengan menggunakan dari beberapa dokumen-dokumen, artikel pendukung maupun buku (Imro, 2019). Dalam hal ini, penelitian ini menggunakan data sekunder berupa regulasi serta penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Implementasi Program Indonesia Pintar di Kecamatan Banyumanik Kota Semarang.

1.10.6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang strategis karena memiliki tujuan utama dalam penelitian untuk mendapatkan data (Sugiyono, 2020). Terdapat beberapa teknik dalam pengumpulan data, diantaranya :

a. Wawancara

Wawancara merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengajukan pertanyaan kepada informan (Sugiyono, 2020). Wawancara ini dilakukan dengan informan yang memiliki pengetahuan tentang Kebijakan Program Indonesia Pintar pada Kecamatan Banyumanik Kota Semarang, seperti Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 1 Provinsi Jawa Tengah, SMA 4 Kota Semarang, SMA 09 Kota Semarang, SMA Mardisiswa dan Kelurahan Srandol Wetan, serta peserta didik yang menerima PIP. Dalam memilih informan untuk wawancara ini, digunakan metode purposive sampling yang dijadikan sampel. Penggunaan teknik ini dengan beberapa pertimbangan yang diberikan adalah kepala keluarga yang menerima bantuan Kartu Indonesia Pintar sehingga nantinya hasil penelitian dapat memberikan gambaran terhadap hasil dan mewakili keadaan secara langsung di masyarakat.

b. Dokumentasi

Catatan tentang peristiwa yang telah terjadi disebut dokumentasi. Dokumen bisa berupa gambar, tulisan, atau karya yang diabadikan dari seseorang (Sugiyono, 2020). Peneliti melakukan dokumentasi saat melakukan observasi di Kecamatan Banyumanik Kota Semarang, khususnya SMA 4 Kota Semarang, SMA 09 Kota Semarang, SMA Mardisiswa, Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 1 Provinsi Jawa Tengah dan Kelurahan Srandol Wetan.

c. Studi kepustakaan

Pengumpulan data dan informasi dari berbagai sumber seperti artikel, buku, dan jurnal dikenal sebagai studi kepustakaan (Sugiyono, 2020). Peneliti menggunakan studi kepustakaan dengan merujuk pada artikel, buku, dan jurnal yang berkaitan dengan Implementasi Program Indonesia Pintar.

1.10.7. Analisis Interpretasi Data

Analisis data Menurut Sugiyono (2008:244), analisis data adalah proses sistematis untuk mencari dan menyusun informasi dari wawancara, catatan lapangan, dan sumber lain agar dapat dipahami dengan jelas dan disampaikan kepada orang lain (Pratiwi, 2017).

Analisis data merupakan langkah penting dalam prosedur penelitian. Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan selama pengumpulan data dan setelah proses pengumpulan data selesai. Huberman dalam Sugiyono (Wanto, 2018) ada tiga tindakan simultan yang terjadi selama analisis data, yaitu:

- a. *Data Reduction* atau reduksi data, merupakan suatu proses analisis data dimulai dengan memilih, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksi, dan mengubah data mentah dari catatan tertulis yang terkait dengan kerja lapangan.
- b. *Data Display* atau tampilan data, yaitu data yang telah terstruktur memfasilitasi pengguna untuk membuat keputusan dan mengambil

tindakan, dengan disajikan dalam bentuk sinopsis dan analisis yang menggambarkan hubungan antara teori-teori tersebut.

- c. *Conclusion Drawing / Verification* (Kesimpulan), yaitu kegiatan mencari makna melibatkan pengidentifikasian turunan, pola, pembenaran, potensi pengaturan, rantai kausal, dan proposisi.

1.10.8. Kualitas Data

Menurut Sugiyono (2013: 241-242), teknik triangulasi melibatkan pengumpulan data dari berbagai sumber dan metode pengambilan data yang berbeda. Dalam penelitian, triangulasi dilakukan dengan klasifikasi berbagai teknik pengumpulan data seperti observasi terstruktur, wawancara terstruktur di Kecamatan Banyumanik Kota Semarang meliputi Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 1 Provinsi Jawa Tengah, SMA 4 Kota Semarang, SMA 09 Kota Semarang, SMA Mardisiswa dan Kelurahan Sronol Wetan, dan juga dokumen terkait implementasi Program Indonesia Pintar di SMA Kecamatan Banyumanik. Tujuannya adalah untuk mendapatkan data dengan karakteristik yang serupa.

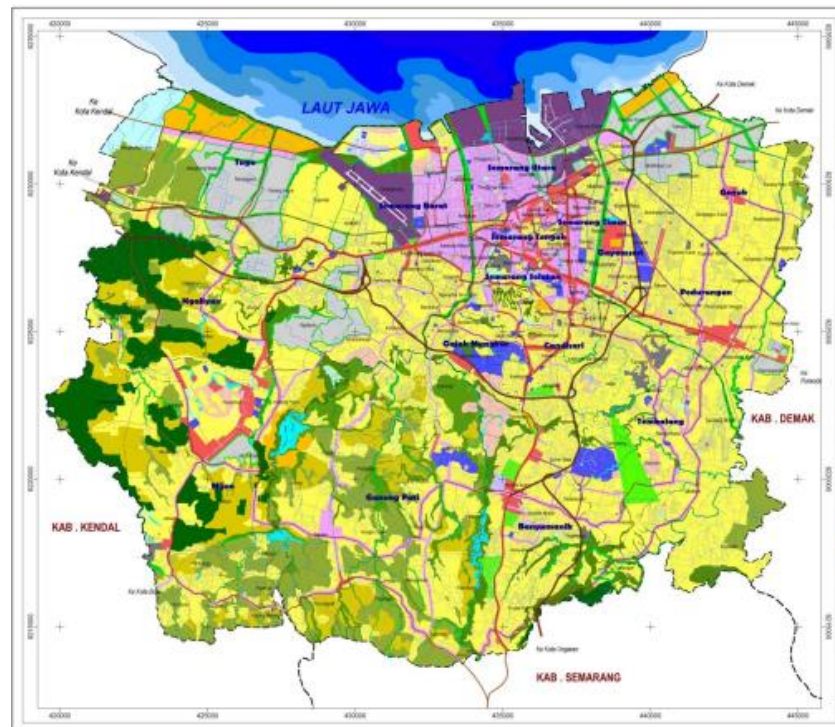
BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1. Kondisi Geografis di Kota Semarang

Kota Semarang merupakan ibu kota Provinsi Jawa Tengah yang terletak di bagian Utara Jawa Tengah, meliputi luas wilayah administratif sebesar 373,70 km² atau seluas 37.369,568 hektar. Secara geografis, Kota Semarang berada di 6° 50'-7° 10' LS dan 109° 35'- 110° 50' BT. Kota Semarang mempunyai batasan-batasan diantaranya sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Demak, sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kendal, dan sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Semarang.

Gambar 2. 1 Peta Kota Semarang



Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah (diolah)

2.2. Kondisi Demografis di Kota Semarang

Penduduk di Kota Semarang pada tahun 2023 berdasarkan dokumen Kota Semarang berjumlah 1.659.975 jiwa, jumlah penduduk di Kota Semarang mengalami peningkatan dari tahun 2021 sebesar 1.656.564 jiwa. Kepadatan penduduk terlihat meningkat seiring dengan kenaikan jumlah penduduk sebesar 4.441 Jiwa, selain itu Persebaran penduduk di seluruh kecamatan di Kota Semarang tidak merata

Tabel 2. 1 Tabel Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Setiap Kecamatan di Kota Semarang 2023

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk
1	Mijen	89.948	1.591,35
2	Gunungpati	100.752	1.729
3	Banyumanik	143.433	4.822,53
4	Gajah Mungkur	56.350	6.030,73
5	Semarang Selatan	62.179	10.456,73
6	Candisari	75.614	11.820,08
7	Tembalang	198.862	5.038,38
8	Pedurungan	196.526	9.309,77
9	Genuk	132.473	5.099,22
10	Gayamsari	70.409	11.319,94
11	Semarang Timur	66.481	12.261,64
12	Semarang Utara	117.887	10.347,60
13	Semarang Tengah	55.213	10.672,11
14	Semarang Barat	149.326	6.888,81
15	Tugu	33.795	1.201,59
16	Ngaliyan	145.495	3.384,58
	KOTA SEMARANG	1.694.743	4.534,07

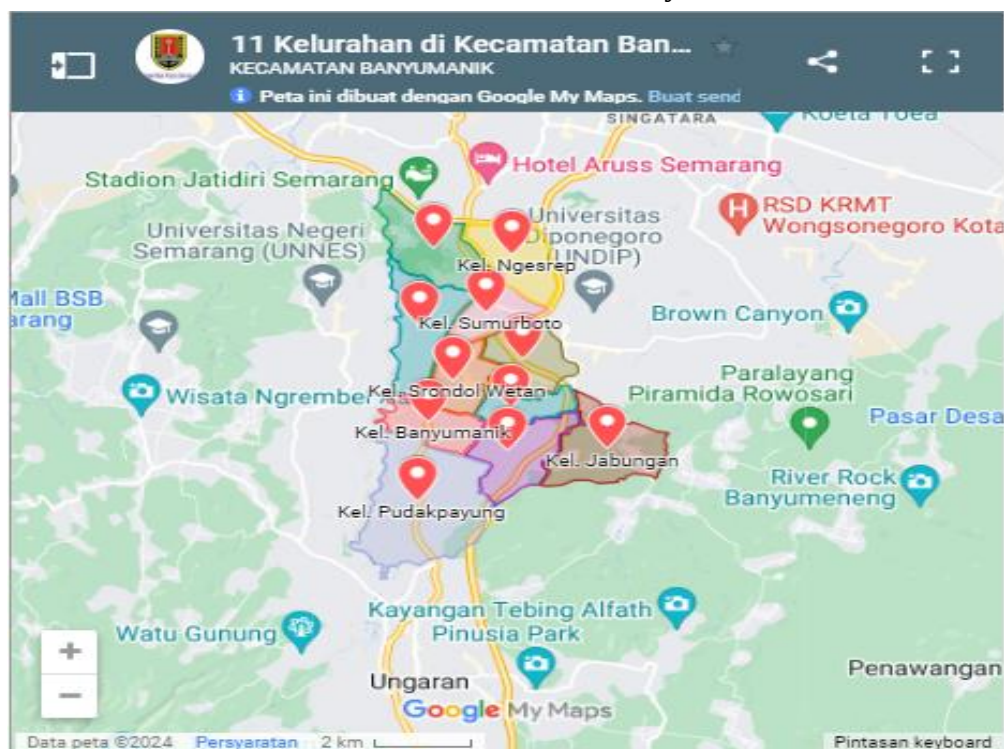
Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah (diolah)

2.3. Gambaran umum Kecamatan Banyumanik

Kecamatan Banyumanik adalah salah satu dari 16 Kecamatan yang berada di Kota Semarang. Kecamatan Banyumanik berada di bagian selatan atau dikenal dengan baguan atas Kota Semarang. Jarak Kecamatan Banyumanik

menuju Ibukota Kota Semarang sekitar 10,2 km dan memiliki luas wilayah pada tahun 2022 sebesar 29,74 km² dengan memiliki 11 kelurahan dan jumlah penduduk sebesar 143.953 Jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar 4.480 (per/km²).

Gambar 2. 2 Peta Kecamatan Banyumanik



Sumber: <https://kecbanyumanik.semarangkota.go.id/geografis-dan-penduduk>

Kecamatan Banyumanik memiliki visi dan misi. Visi Kecamatan Banyumanik adalahh “Terwujudnya Kota Semarang yang semakin Hebat berlandaskan Pancasila dalam Bingkai NKRI yang Ber-Bhineka Tunggal Ika”. Misi Kecamatan Banyumanik, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas dan kapasitas Sumber Daya Manusia yang unggul dan produktif guna mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial

2. Meningkatkan potensi ekonomi lokal yang mempunyai daya saing dan stimulasi pembangunan industri, berlandaskan riset serta inovasi berdasar prinsip demokrasi ekonomi Pancasila
3. Menjamin kemerdekaan masyarakat dengan menjalankan ibadah, pemenuhan hak dasar, dan perlindungan kesejahteraan sosial serta hak asasi manusia bagi masyarakat yang berkeadilan
4. Mewujudkan infrastruktur berkualitas yang mempunyai wawasan lingkungan guna mendukung kemajuan kota
5. Menjalankan reformasi birokrasi pemerintahan secara dinamis dan Menyusun produk hukum yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam struktur NKRI

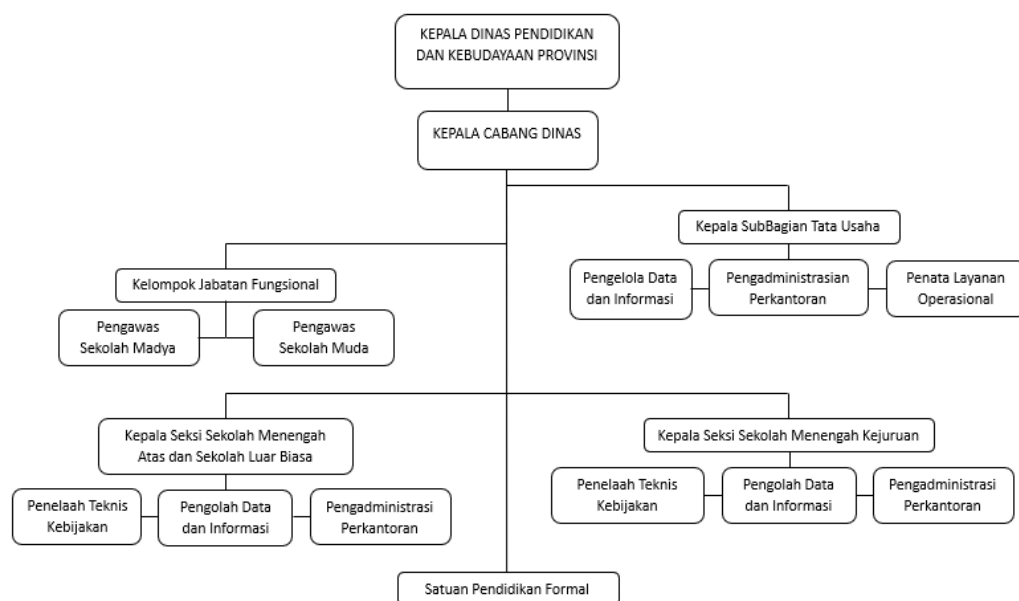
2.4. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 1 Provinsi Jawa Tengah

Cabang Dinas Pendidikan mempunyai tugas untuk membantu Dinas Pendidikan provinsi dalam menjalankan tugasnya di bidang pengendalian Sekolah Menengah Atas, Sekolah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa di wilayah kerja.

Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 1 memiliki visi dan misi. Visi Cabdin Wilayah 1 adalah “Pendidikan Jawa Tengah yang bermoral, kompetitif, dan cinta tanah air, peningkatan kualitas sumber daya manusia yang ditopang oleh kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan yang transparan, akuntabel dan profesional yang menghasilkan peserta didik yang berakhlak mulia, berdaya saing dan memiliki rasa kebangsaan yang tinggi dilandasi dengan nilai budaya dan kearifan lokal”. Misi Cabdin Wilayah 1 yaitu:

1. Membangun budaya kerja yang prestatif dan bermoral bagi seluruh aparatur penyelenggara Pendidikan
2. Menjamin penyelenggara Pendidikan yang bermutu, berkelanjutan, merata dan berkeadilan sesuai otonomi daerah dan tugas pembantuan
3. Mewujudkan insan yang berkepribadian patriotis.
4. Mengupayakan pengelolaan manajemen layanan pendidikan yang transparan, efisien dan efektif
5. Membudayakan kepedulian terhadap masyarakat mengenai pendidikan nasional

Gambar 2.3 Struktur Organisasi Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Wilayah I



Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah (diolah)

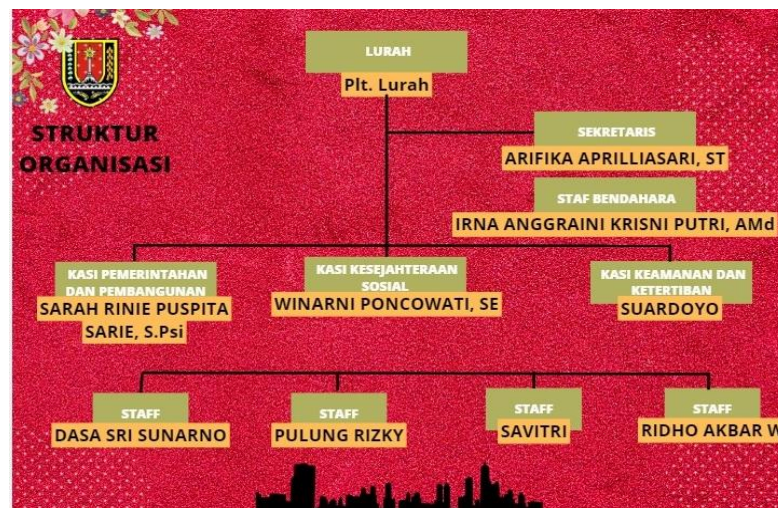
Pada struktur tersebut bagian yang mengurus Program Indonesia Pintar adalah Koordinator satuan Pendidikan formal yang didalamnya terdapat Cabang

Wilayah 1 yaitu bagian Kepala Seksi Sekolah menengah atas dan Sekolah Luar biasa dengan subdivisi Pengadministrasi Perkantoran

2.5. Kelurahan Srandol Wetan

Kelurahan berdasarkan Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2018 Pasal 1 Ayat 2 tentang Kecamatan. Dijelaskan bahwa Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan yang berperan sebagai perangkat Kecamatan. Kelurahan Srandol Wetan terletak di daerah Kota Semarang bagian Selatan dengan Luas sebesar 226.384 Ha.

Gambar 2. 4 Struktur Pemerintahan Kelurahan Srandol Wetan



Sumber: <https://srandolwetan.semarangkota.go.id/strukturpemerintahan>

Pada struktur tersebut yang mengurus mengenai bantuan sosial adalah pada bagian Kasih kesejahteraan sosial dan staf yang memiliki peran sebagai Verifikasi dan Validasi mengenai bantuan sosial, Kelurahan Srandol Wetan terdapat 18 RW dan memiliki 132 RT. Berikut ini merupakan batas-batas wilayah, yaitu :

- Sebelah Utara : Kelurahan Sumurboto
- Sebelah Timur : Kelurahan Pedalamngan dan Padangsari
- Sebelah Selatan : Kelurahan Banyumanik
- Sebelah Barat : Kelurahan Srandol Kulon

Kelurahan Srandol Wetan memiliki Kantor Kelurahan yang berada di Jalan Bina Remaja No. 39, Srandol Wetan, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang. Kelurahan Srandol Wetan merupakan wilayah dengan jumlah kepadatan penduduk kedua terbanyak sekecamatan Banyumanik. Jumlah penduduk per jiwa di Kelurahan Srandol Wetan, diantaranya :

Tabel 2. 2 Jumlah Penduduk Perjiwa Di Kelurahan Srandol Wetan

Tahun	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
2021	11.573	12.086	23.659
2022	11.533	12.055	23.588
2023	11.463	11.891	23.354
2024	11.370	11.841	23.211

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah (diolah)

Kelurahan Srandol Wetan memiliki visi dan misi. Visi Kelurahan Srandol Wetan adalah “Terwujudkan Kelurahan Srandol Wetan sebagai daerah perdagangan dan jasa yang berbudaya menuju Masyarakat Sejahtera”, Misi Kelurahan Srandol Wetan yaitu:

1. Mewujudkan Sumber Manusia yang lebih baik
2. Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik yang efektif dan efisien serta menjunjung tinggi supremasi
3. Mewujudkan kemandirian dan Daya Saing
4. Mewujudkan Tata Ruang wilayah dan infrastruktur yang berkelanjutan
5. Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera